DINAS KELAUTAN
& PERIKANAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

#Berani Makmur

#Berani Tangkap Banyak

RENSTRA 2025-2029

DISLUTKAN

SULTENG

"Meningkatkan PDRB, Produktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Pemanfaatan Ruang Sektor Kelautan dan Perikanan"

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan ururan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalag dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan rah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

(1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

a. Bab I PENDAHULUAN
Memuat :
1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

b. Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
   a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
   b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
   c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai denga tupoksinya); dan
   d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelolmpok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
   a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
   b) Isu strategis.

c. Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat :
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

e. Bab V PENUTUP

Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

(2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

a. persiapan Penyusunan;
b. penyusunan Rancangan;
c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
d. perumusan rancangan akhir;
e. fasilitasi rancangan akhir; dan
f. penetapan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan arah dan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan kelautan dan perikanan periode 2025-2029 yang disusun secara komprehensif, sehingga program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dapat terpadu, sinergi, fokus dan responsif terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi.

Rancangan Akhir Renstra ini disusun dengan merujuk pada beberapa aturan hukum perencanaan, Visi Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 serta Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang selaras dengan AstaCita Pemerintah Pusat. Disadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak ditemui kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Segala bantuan dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya.

Akhirnya semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat-Nya dalam tugas keseharian kita.

Palu, 25 September 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MOH. ARIF LATJUBA, SE, M.Si
NIP. 19660418 199203 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
EXECUTIVE SUMMARY v

I. PENDAHULUAN I.1
1.1. Latar Belakang I.1
1.2. Landasan Hukum I.3
1.3. Maksud dan Tujuan I.7
1.4. Sistematika Penyusunan I.7

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH II.1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II.3
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah II.3
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah II.24
2.1.2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia II.24
2.1.2.2 Aset yang Dikelola II.26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah II.27
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan II.35
2.1.5 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah II.35
2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah II.36
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis II.43

III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III.1
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah III.1
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan III.7

IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV.1
4.1. Uraian Program IV.7
4.2. Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan IV.11

V. PENUTUP V.1

DAFTAR GAMBAR

	Gambar	Halaman
2.1	Peta Potensi Sebaran dan Status Potensi SDI	II.2
2.2	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	II.4
2.3	Struktur Organisasi UPT Perbenihan Perikanan	II.4
2.4	Struktur Organisasi UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan	II.5
2.5	Struktur Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi	II.5
2.6.	Grafik Series Produksi Perikanan Sulawesi Tengah 2021-2024	II.29
3.1	*Logframe* Misi 2	III.3
3.2	*Logframe* Misi 3 Tujuan 1	III.3
3.3	Bagan Alur Pikir Renstra 2025-2029	III.4
3.4	Pohon Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	III.6
4.1	Pilar, Sub Pilar dan Indikator Ekonomi Biru	IV.3
4.2	*Crosscutting* Indeks Ekonomi Biru Dinas Kelautan dan Perikanan	IV.4
4.3	*Crosscutting* Program Penanggulangan Kemiskinan	IV.5
4.4	*Crosscutting* Pengarusutamaan Gender	IV.6
4.5	*Crosscutting* Program Petani Milenial Kelautan dan Perikanan	IV.7

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Komposisi Tingkatan Pendidikan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ..... II.24
2.2 Komposisi Tingkatan ASN Berdasarkan Golongan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ..... II.24
2.2.1. Komposisi Tingkatan ASN Berdasarkan Jabatan II.25
2.3 Komposisi Tingkatan ASN Berdasarkan Jenis Kelamin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ..... II.25
2.4 Aset Tetap Per 30 Juni 2025 ..... II.26
2.5 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024 ..... II.27
2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah II.28
2.7 Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Per Juni 2025 ..... II.35
2.8 Daftar Kerjasama Daerah sampai dengan Tahun 2025 ..... II.36
2.9 Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Tengah Tahun 2024-2043 ..... II.44
2.10 Usulan Pembaruan Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Tengah 2025 ..... II.45
2.11 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ..... II.50
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah III.5
3.2 Penahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah..... III.7
3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. III.9
4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan IV.11
4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan..... IV.16
4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV.31
4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan IV.36
4.6 Indikator Kinerja Kunci IV.37

EXECUTIVE SUMMARY

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kepala Daerah memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mana akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan permasalahan yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam proses penyusunan renstra, perangkat daerah melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan. Sumberdaya ikan terbagi atas sumberdaya ikan pelagis kecil, Ikan pelagis besar dan sumberdaya ikan demersal serta biota lainnya. Potensi sumberdaya ikan di perairan Provinsi Sulawesi Tengah terbagi dalam 4 (empat) zona WPP (KKP, 2020) yaitu (1) Selat Makasar (WPP 713) sebanyak 1.177.857 ton/tahun, (2) Teluk Tomini (WPP 715) sebanyak 949.955 ton/tahun, (3) Laut Sulawesi (WPP 716) sebanyak 566.144 ton/tahun dan (4) Teluk Tolo-Laut Banda (WPP 714) sebanyak 566.891 ton/tahun.

Potensi sumberdaya perikanan budidaya di Sulawesi Tengah juga cukup besar. Luas kawasan budidaya laut secara terperinci budidaya laut seluas 459.913 Ha meliputi budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas utama ikan kerapu, kakap, dan bawal; udang vaname, budidaya rumput laut, kekerangan, dan budidaya tiram mutiara dan budidaya air payau seluas 90.962 Ha dengan komoditas utama udang, bandeng, kepiting, dan rumput laut (KKP, 2016) serta kawasan budidaya air tawar seluas 134.183,3 Ha dengan komoditas utama nila, mas dan lele. Tingkat produksi perikanan budidaya tahun 2024 pada sektor perikanan budidaya sebesar 803.370,46 ton terdiri dari komoditas rumput laut sebesar 752.242,44 ton, budidaya jaring apung laut dan laut lainnya sebesar 413,18 ton, budidaya udang dan bandeng sebesar 46.534,64 ton dan budidaya ikan air tawar sebesar 4.180,20 ton.

Dalam rangka membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pelayanan baik perijinan maupun non perijinan yang ditujukan kepada: (1) nelayan; (2) pembudidaya; (3) pengolah; (4) pemasar; (5) petambak garam; (6) kelompok masyarakat pesisir; (7) kelompok masyarakat pengawas; serta (8) stakeholder terkait lainnya, dimana dalam pelaksanaan pelayanan terdapat berbagai permasalahan yang hadapi, antara lain: (1) Kualitas SDM Pelaku usaha kelautan perikanan yang relatif rendah; (2) Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha; (3) Penggunaan teknologi yang masih sederhana dan tradisional; (4) Terbatasnya sarana prasarana dan infrastruktur kelautan perikanan yang memadai; (5) Sistem Pendataan dan Informasi yang belum terintegrasi; (6) sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas; (7) Keterbatasan BBM bersubsidi dan es; (8) Penanganan Ikan di atas kapal dan pasca panen yang masih konvensional; (9) Terbatasnya akses pemasaran dan permodalan bagi pelaku usaha kelautan perikanan;

(10) Masih maraknya IUU Fishing; (11) Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan yang tidak seimbang; (12) Mahalnya biaya operasi pengawasan SDKP dan penanganan pelanggaran; (13) Regulasi yang berubah-ubah; (14) Tata kelola Pemerintahan yang belum optimal. Dari permasalahan-permasalahn tersebut yang dikaitkan dengan isu KLHS dan Isu Global, Nasional maupun Regional ada 4 (empat) isu strategis perangkat daerah yaitu: (1) Kualitas Sumberdaya Manusia; (2) Daya saing sub sektor kelautan dan perikanan; (3) Pengawasan SDKP dan Ancaman degradasi lingkungan; serta (4) Inkonsistensi regulasi.

Guna mewujudkan Visi Indonesia 2025-2029, **"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"** yang tertuang dalam 8 (delapan) misi **Asta Cita**, kebijakan "Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas", serta mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, "Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029" dimana kelautan dan perikanan masuk dalam misi 2, "Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan" dan misi 3, "Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor", ditetapkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah 2025-2029, yaitu: "Meningkatkan PDRB, Produktifitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Pemanfaatan Ruang Sektor Kelautan dan Perikanan". Tujuan ini diterjemahkan dalam 5 (lima) Program Teknis, yaitu (1) Pengelolaan Perikanan Tangkap; (2) Pengelolaan Perikanan Budidaya; (3) Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan; (4) Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (5) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta 1 (satu) Program Penunjang urusan pemerintahan.

Pengembangan perikanan budidaya dilakukan melalui (1) pengembangan Rumput Laut dengan komoditas unggulan antara lain: *Eucheuma cottonii, E. Spinosum* dan *Gracilaria verrucosa*, Udang, Bandeng, Nila, Mas, Lele melalui karamba jaring tancap (KJT) dan karamba jaring apung (KJA), kolam ekstensif dan kolam intensif menggunakan inovasi teknologi budidaya; (2) peningkatan kapasitas dan kelembagaan pembudidaya; (3) pengembangan sarana prasarana perbenihan dan pendukungnya pada unit pelaksana teknis dinas dan unit perbenihan rakyat; (4) pengembangan kampung budidaya merah putih; (5) pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan; (6) Pendampingan sertifikasi proses budidaya ikan yang baik dan (7) Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan perikanan budidaya.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan melalui revitalisasi perikanan tangkap yang dilakukan melalui upaya: (1) Pemulihan stok sumber daya ikan; (2) Penguatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan dengan sarana pendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN); (3) Restrukturisasi armada kapal perikanan; (4) Pengembangan kampung nelayan merah putih; dan (5) Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan dengan fokus pada penataan izin usaha penangkapan ikan melalui penerapan sistem berbasis *online system.*

Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dilakukan melalui: (1) Pengembangan produk dan promosi hasil perikanan; (2) Peningkatan pendapatan pengolah dan pemasaran hasil perikanan; (3) Peningkatan infrastruktur sistem logistik ikan nasional (SLIN); (4) Peningkatan Konsumsi Ikan; dan (5) Peningkatan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan.

Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan melalui beberapa upaya antara lain: (1) Penataan regulasi dan perijinan kelautan perikanan; (2) Pengelolaan dan pendayagunaan Kawasan Konservasi dan Pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dan ekowisata; (3) Pemetaan dan pengelolaan mitigasi dan adaptasi bencana perubahan dan pencemaran wilayah Kelautan, pesisir dan Pulau-pulau kecil; (4) Peningkatan sistem pengawasan terintegrasi berupa pengawasan kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP; (5) Pemetaan dan rencana strategis penanggulangan daerah rawan *illegal fishing*; dan (6) Sosialisasi peraturan perundang undangan bidang perikanan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Implementasi penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, baik jajaran struktural, fungsional maupun pelaksana dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dinas/badan dan sasaran pembangunan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dan berkualitas sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Palu, 25 September 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MOH. ARIF LATJUBA, S.E., M.Si.
NIP. 19660418 199203 1 009

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Pembangunan di daerah diwajibkan untuk dapat menyusun perencanaan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap tuntutan dari keinginan masyarakat luas di daerah masing-masing dan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 bertujuan untuk mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi Pembangunan Indonesia 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu acuan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan selain memperhatikan hasil evaluasi RPJMD 2021-2026, masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan analisis atas berbagai tantangan pembangunan juga memprioritaskan pembangunan pada aspek kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi, tingkat penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, hukum berkeadilan, keamanan provinsi tangguh dan dekmokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro,

ketangguhan diplomasi dan berdaya gentar kawasan, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, Kesetaraan gender dan masyarakat inklusif; lingkungan hidup berkualitas, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kepala Daerah memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mana akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra perangkat daerah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan permasalahan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis ini disusun melalui proses analisis dari hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini termasuk ketersediaan sumberdaya kelautan dan perikanan dan sumberdaya manusia sebagai pelaksana pembangunan, sehingga dapat diketahui permasalahan dan tantangan yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dalam proses penyusunan renstra, perangkat daerah melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi serta berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan Renstra perangkat daerah juga memiliki keterkaitan dengan Renstra yang telah dikeluarkan oleh K/L dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan menjadi dasar PD dalam menyusun rencana kerjanya selama 5 (lima) tahun, dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis KKP RI untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Disamping itu renstra perangkat daerah juga menjadi salah satu acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun rencana strategisnya di bidang kelautan dan perikanan.

Berkaitan dengan hal tersebut kemudian disusun Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rancangan Awal Renstra Dislutkan Sulteng adalah peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Tahun 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;

18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
26. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023- 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
31. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

37. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai arahan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, pelaku usaha serta pihak-pihak terkait lainnya dalam sub sektor kelautan dan perikanan.

Tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perencanaan Kerja Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas yang menangani kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota;
2. Menjadi instrumen dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dikelola pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pemerintah pusat;
3. Menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan sub sektor kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring evaluasi (monev).

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

2.1.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

4.1 Uraian Program;

4.2 Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Provinsi Sulawesi Tengah secara adminsitratif ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Provinsi ini terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, dengan luas wilayah daratan mencapai 61.841,29 km^2, luas perairan laut sebesar 74.452,37 km^2 dengan jumlah pulau sebanyak 1.572, serta garis pantai sepanjang 7.010,6 km. Hingga tahun 2014, secara administratif Sulawesi Tengah dibagi dalam 12 kabupaten, 1 (satu) kota dengan 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Letak wilayah Sulawesi Tengah secara astronomis berada pada posisi $2^0$22' Lintang Utara; $3^0$48' Lintang Selatan dan $119^0$22' – $124^0$22' Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Utara : Laut Sulawesi, Provinsi Gorontalo;
b. Timur : Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara;
c. Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
d. Barat : Provinsi Sulawesi Barat, Selat Makassar

Wilayah pengelolaan Perikanan (WPP) Sulawesi Tengah dibagi dalam 4 (empat) zona, yaitu WPP 713 (meliputi wilayah Selat Makassar, yaitu Kabupaten Donggala, Kota Palu dan Kabupaten Toli Toli; WPP 714 (meliputi Teluk Tolo, yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara; Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut; WPP 715 (meliputi Teluk Tomini, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong) dan WPP 716 (meliputi Laut Sulawesi, yaitu Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol).

Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan. Sumberdaya ikan terbagi atas sumberdaya ikan pelagis kecil, Ikan pelagis besar dan sumberdaya ikan demersal serta biota lainnya. Potensi sumberdaya ikan di perairan Provinsi Sulawesi Tengah terbagi dalam 4 (empat) zona WPP (KKP, 2020) yaitu (1) Selat Makasar (WPP 713) sebanyak 1.177.857 ton/tahun, (2) Teluk Tomini (WPP 715) sebanyak 949.955 ton/tahun, (3) Laut Sulawesi

(WPP 716) sebanyak 566.144 ton/tahun dan (4) Teluk Tolo-Laut Banda (WPP 714) sebanyak 566.891 ton/tahun.

Volume produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 adalah 434.910,667 ton dengan nilai sebesar Rp12,32 triliun (BPS, 2024). Sumberdaya ikan yang berada di wilayah Sulawesi Tengah yang sering ditemui dan memiliki nilai ekonomis antara lain tuna, pari, layur, ekor kuning, layang,tenggiri, rajungan, cakalang, tongkol. Bagi penangkapan ikan di laut, daerah potensial penangkapan ikan dapat dibagi menjadi daerah potensi ikan pelagis, dan daerah potensi ikan demersal.

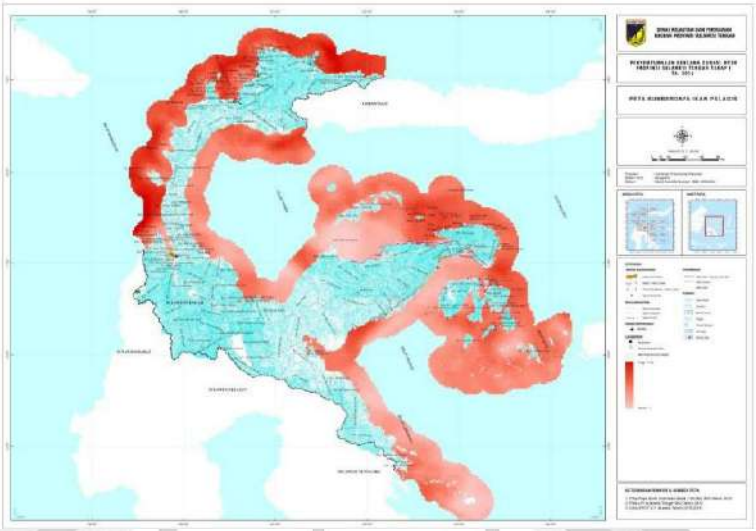

Gambar 2.1. Peta Potensi Sebaran dan Status Potensi Sumberdaya Ikan Sulawesi Tengah

Wilayah perairan Selat Makassar merupakan daerah penyebaran dan *fishing ground* dari ikan tuna, cakalang, serta daerah pengembangan rumput laut, Teluk Tomini merupakan daerah penyebaran bagi jenis-jenis ikan tuna, cakalang, udang, teripang, tongkol, rumput laut, teripang dan cumi-cumi serta Teluk Tolo merupakan *fishing ground* dan daerah penyebaran untuk jenis ikan tuna, cakalang, tongkol, udang laut dan daerah penyebaran rumput laut, teripang dan kerang mutiara.

Potensi sumberdaya perikanan budidaya di Sulawesi Tengah juga cukup besar. Luas kawasan budidaya laut secara terperinci budidaya laut seluas 459.913 Ha meliputi budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas utama ikan kerapu, kakap, dan bawal; udang vaname, budidaya rumput laut, kekerangan, dan budidaya tiram mutiara dan budidaya air payau seluas 90.962 Ha dengan komoditas utama udang, bandeng, kepiting, dan rumput laut (KKP, 2016) serta

kawasan budidaya air tawar seluas 134.183,3 Ha dengan komoditas utama nila, mas dan lele. Tingkat produksi perikanan budidaya tahun 2024 pada sektor perikanan budidaya sebesar 803.370,46 ton terdiri dari komoditas rumput laut sebesar 752.242,44 ton, budidaya jaring apung laut dan laut lainnya sebesar 413,18 ton, budidaya udang dan bandeng sebesar 46.534,64 ton dan budidaya ikan air tawar sebesar 4.180,20 ton.

Pengembangan kawasan areal yang memiliki kesesuaian karakteristik perikanan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelerengan di bawah 8 persen dan persediaan air yang cukup dengan potensi tambak seluas 42.095,15 Ha yang terolah 11,3 persen, potensi budidaya air tawar seluas 134.183,3 Ha terolah 5,8 persen, terdiri atas danau seluas 48.458 Ha, rawa seluas 12.275 Ha dan sungai 10.195 Ha (RZWP3K Provinsi Sulawesi Tengah, 2022).

Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah cukup beragam seperti ekosistem terumbu karang seluas 186.766,71 Ha, padang lamun seluas 27.406,48 Ha dan mangrove seluas 33.876,29 Ha yang merupakan sumberdaya hayati potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengangkat pendapatan ekonomi daerah ini (RZWP3K Provinsi Sulawesi Tengah, 2022).

Keberadaan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang dimiliki demikian besar itu adalah merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya mengingat masih rendahnya tingkat pemanfaatan hasil laut, sehingga perlu lebih disosialisasikan lagi mengenai potensi pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dibarengi juga dengan pemberian pelayanan bidang kelautan dan perikanan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 57

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berikut Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

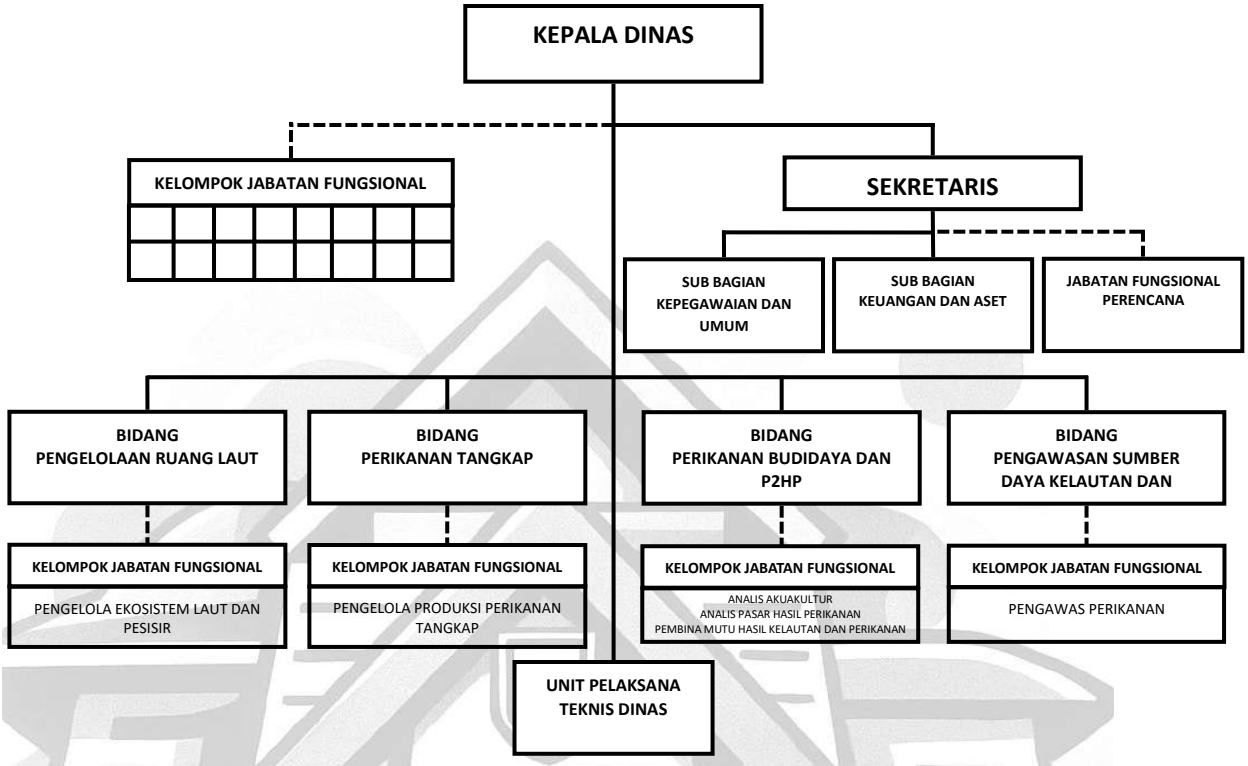

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun 2023 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang semula berjumlah 10 mengalami penyesuiaian struktur organisasi menjadi 9 (sembilan) UPT, sebagai berikut:

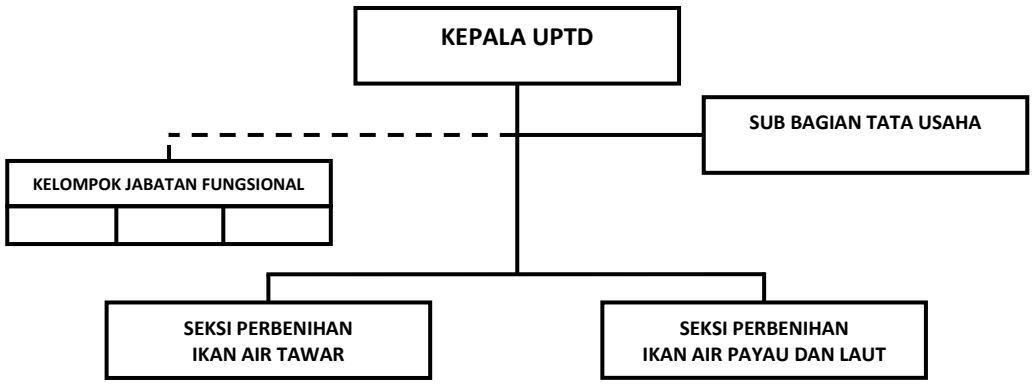

Gambar 2.3.
Struktur Organisasi UPT Balai Perbenihan Perikanan

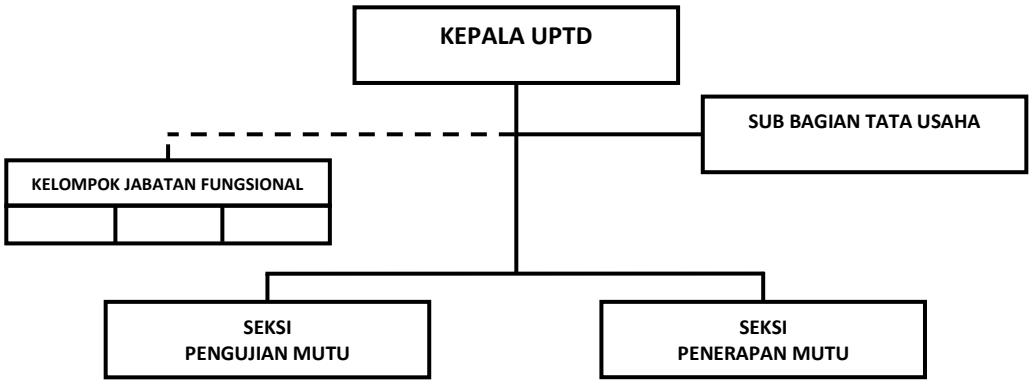

Gambar 2.4.
Struktur Organisasi UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan

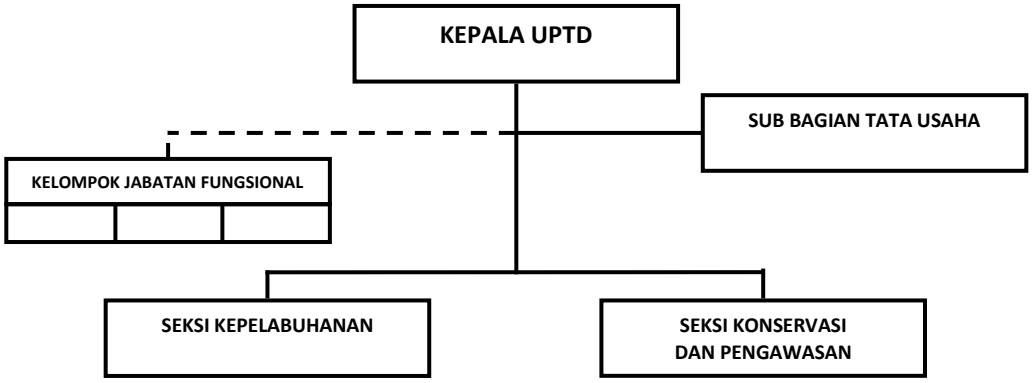

Gambar 2.5
Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I hingga VII

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok dan fungsi sekretariat, masing-masing bidang/ UPT, subbagian, seksi, kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

Tugas :

Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Keuangan dan Asset

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan asset.

Uraian Tugas :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian keuangan dan aset;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan keuangan dan aset;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan asset dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
6. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan asset;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan aset serta Dinas.

b. Sub bagian Kepegawaian dan Umum

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian Tugas :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri dan SKP;
6. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan hukum;
7. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan;
8. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
9. Melaksanakan/ mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
10. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
11. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
14. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

B. Bidang Pengelolaan Ruang Laut

Tugas :

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang laut dan Konservasi Ruang Laut;
3. pengkoordinasian bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
5. pelaksanaan tugas teknis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Ruang Laut.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Tugas :

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
3. pengkoordinasian bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
5. pelaksanaan tugas teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap.

D. Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP

Tugas :

Membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan fungsi Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. pengkoordinasian bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. pelaksanaan tugas teknis bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP.

E. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tugas :

Membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap menyelenggarakan fungsi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
3. pengkoordinasian bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
5. pelaksanaan tugas teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diturunkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

3) Pemberian Penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Ketua tim; dan b. Anggota tim.
5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

A) UPT Balai Perbenihan Perikanan

Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Balai Perbenihan Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis perbenihan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Balai Perbenihan Perikanan yakni menyelenggarakan perbenihan perikanan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang perbenihan perikanan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Balai Perbenihan Perikanan;
2. Pelaksanaan pelayanan dan pengkajian teknologi di bidang perbenihan dan budidaya perikanan;

3. Pelaksanaan tugas teknis operasional/penunjang Dinas di bidang perbenihan perikanan; dan
4. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana perbenihan perikanan.

a. Kepala UPTD

Bertugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar;
2. Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Balai Perbenihan Perikanan;
3. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.

Uraian Tugas :

1. melaksanakan penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Balai Perbenihan Perikanan;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan perikanan;
4. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Balai Perbenihan Perikanan;
5. melaksanakan publikasi data dan informasi UPTD Balai Perbenihan Perikanan;

6. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
7. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
9. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Balai Perbenihan Perikanan.

c. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar

Bertugas menyiapkan bahan dan data, melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air tawar.

Uraian tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar;
2. Melaksanakan pengelolaan Perbenihan Ikan Air Tawar;
3. Melaksanakan identifikasi, administrasi inventarisasi Seksi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air tawar;
4. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
5. Melaksanakan kajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air tawar;
6. Melaksanakan pengelolaan induk unggul di bidang perbenihan ikan air tawar;
7. Melaksanakan produksi perbenihan pembudidayaan ikan air tawar;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar dengan unit kerja terkait;

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air tawar;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar.

d. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut

Bertugas menyiapkan bahan dan data, melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut.

Uraian tugas :

1. melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi Seksi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air payau dan laut;
4. melaksanakan kajian teknologi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
5. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
6. melaksanakan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air payau dan laut;
7. melaksanakan pengelolaan induk unggul serta produksi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut dengan unit kerja terkait;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air payau dan laut;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut.

B) UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)

Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan yakni menyelenggarakan penerapan mutu hasil perikanan.

UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan.

Untuk Melaksanakan tugas tersebut UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
2. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
3. pelaksanaan Pelayanan Tugas teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan; dan
4. pelaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana penerapan mutu hasil perikanan..

a. Kepala UPTD

Bertugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan dibidang Penerapan Mutu Hasil Perikanan;

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis oprasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
2. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan;
3. Melaksanakan Pengelolaan ketatausahaan dan kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.

Uraian Tugas :

1. melaksanakan penyusunan program;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana penerapan mutu hasil perikanan;
4. memberikanan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
5. melaksanakan publikasi data dan informasi UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
6. melaksanakan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan anggaran UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
7. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan KARPEG, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Rumah Tangga, Kebersihan dan Keamanan;
8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
9. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

c. Seksi Pengujian Mutu

Bertugas menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan kegiatan pengujian mutu.

Uraian Tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian Mutu;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, aset dan penyusunan anggaran Seksi Pengujian Mutu;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana Seksi Pengujian Mutu;
4. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Mutu;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Seksi Pengujian Mutu;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
7. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian Mutu.
8. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sistem jaminan mutu unit pengolahan ikan dan usaha kecil menengah;
9. melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sertifikasi produk
10. melaksanakan monitoring bahan kimia berbahaya pada produk hasil perikanan;
11. melaksanakan penerapan mutu hasil perikanan, bahan baku dan bahan penolong lainnya;

d. Seksi Penerapan Mutu

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi kegiatan Seksi Penerapan Mutu.

Uraian tugas:

1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Mutu;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, aset dan penyusunan anggaran Seksi Penerapan Mutu;
3. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sistem jaminan mutu unit pengolahan ikan dan usaha kecil menengah;

4. melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sertifikasi produk;
5. menyiapkan bahan laporan hasil penerapan mutu produk perikanan;
6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerapan mutu dengan unit kerja terkait;
7. monitoring dan evaluasi hasil kegiatan penerapan mutu;
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
9. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penerapan Mutu.
10. melaksanakan kajian teknologi pengolahan hasil perikanan;
11. melaksanakan pembinaan teknis penerapan teknologi produk olahan hasil perikanan;
12. melaksanakan pelayanan jasa produk olahan hasil perikanan bernilai tambah;

C) UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I - VII

UPT Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I - VII mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi pulau-pulau kecil pada wilayah I-VII.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I - VII;
2. Pelaksanaan pelayanan, pengendalian tata kelola dan pemanfaatan pelabuhan perikanan serta kesyahbandaran di wilayah kerjanya;
3. Pelaksanaan pelayanan dan pengkajian teknologi di bidang konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pelaksanaan tugas teknis operasional/penunjang Dinas di bidang pelabuhan perikanan dan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

a. Kepala UPTD

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, tata operasional pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
c. pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan perlengkapan aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.

Uraian Tugas :

a. melaksanakan program;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi UPTD Pelabuhan Perikanan Kawasan dan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
d. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
e. melaksanakan publikasi data dan informasi UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan karpeg, kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII.

c. Seksi Kepelabuhanan

Bertugas Melaksanakan pelayanan teknis operasional pelabuhan, pengembangan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan.

Uraian Tugas :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kepelabuhanan;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi seksi Kepelabuhanan;
c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana kesyahbadaran pelabuhan perikanan;
d. melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
e. melaksanakan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan, keberangkatan kapal perikanan serta surat persetujuan berlayar;
f. melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan, pemeriksaan dokumen aktifitas penangkapan ikan, dan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak di pelabuhan perikanan;
g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian dan publikasi data produksi pendaratan ikan di pelabuhan perikanan;
h. melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha di bidang kepelabuhanan perikanan;
i. melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan operasional, pengembangan dan kesyahbadaran pelabuhan perikanan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhanan.

d. Seksi Konservasi dan Pengawasan

Bertugas Melaksanakan pelayanan teknis operasional konservasi kawasan dan pulau-pulau kecil.

Uraian Tugas :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Pengawasan;
b. melaksanakan pengelolaan Administrasi Seksi Konservasi dan Pengawasan;
c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Seksi Konservasi;
d. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pelayanan perizinan di kawasan konservasi;
e. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan kegiatan konservasi;
f. melaksanakan rehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove;
g. melaksanakan perlindungan dan penangkaran terhadap ikan dan ataupun biota perairan yang langka, endemic, terancam punah, dan/atau dilindungi;
h. melaksanakan kegiatan pencadangan kawasan konservasi;
i. melaksanakan penyiapan dan pengolahan data statistik ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove serta jenis dan jumlah biota, kawasan ekosistem bahari serta sumber ekonomi alternatif di area pengelolaan kawasan konservasi, serta penyusunan data series kawasan;
j. melakukan identifikasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi kawasan konservasi;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Pengawasan.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu sektor, demikian pula pada sektor kelautan dan perikanan. Tanpa SDM yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sepanjang tahun 2021-2025 telah dilakukan sejumlah pelatihan teknis baik aparatur maupun masyarakat Perikanan dan Kelautan yang volume dan kualitasnya terus akan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai satuan kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pada penyelenggaraan program dan kegiatan hingga Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 253 orang tenaga ASN. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Komposisi Tingkatan Pendidikan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Bidang /UPTD								Jumlah	Persen-tase
		Sekre-tariat	Budi-daya & P2HP	Tangkap	PSDKP	PRL	PMHP	Pelabuhan	Perbe-nihan		
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
2	S2	4	5	4	4	4	2	8	1	32	13 %
3	S1/DIV	24	16	15	14	23	16	64	19	191	75 %
4	D3	0	0	0	0	1	1	4	0	6	2 %
5	SMU	4	0	4	2	0	0	5	4	19	8 %
6	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
7	SD	0	0	0	0	0	0	4	1	5	2 %
JUMLAH		**32**	**21**	**23**	**20**	**28**	**19**	**85**	**25**	**253**	**100%**

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKP Sulteng (2025)

Tabel 2.2.
Komposisi Tingkatan ASN Berdasarkan Golongan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV	25	9,9 %
2	III	130	51,4 %
3	II	20	7,9 %
4	I	1	0,4 %
5	IX	77	30,4 %
Total		253	100%

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKP Sulteng (2025)

Tabel 2.2.1.
Komposisi Tingkatan ASN Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Struktural	32	12,65%
2	Fungsional	13	5,14%
3	Pelaksana	208	82,21%
JUMLAH		**253**	**100%**

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKP Sulteng (2025)

Tabel 2.3.
Komposisi Tingkatan ASN Berdasarkan Jenis Kelamin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	Bidang /UPTD								Jumlah	Persen-tase
		Sekre-tariat	Budi-daya & P2HP	Tangkap	PSDKP	PRL	PMHP	Pela-buhan	Perbe-nihan		
1	Laki-laki	18	8	17	12	11	5	48	18	137	54 %
2	Perempuan	14	13	6	8	17	14	37	7	116	46 %
JUMLAH		**32**	**21**	**23**	**20**	**28**	**19**	**85**	**25**	**253**	**100 %**

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKP Sulteng (2025)

Per Agustus 2025 DKP Sulteng memiliki 253 orang ASN. Jika dicermati dari ketiga tabel diatas, berdasarkan pendidikan 90 persen ASN DKP Sulteng memiliki tingkat pendidikan tinggi (Sarjana Muda/D3, S1/Diploma-IV, S2 dan S3) atau 229 orang ASN, sementara 10 persen sisanya merupakan lulusan SMU, SMP dan SD. Berdasarkan golongan, 51,4 persen ASN berada pada golongan III, 7,9 persen golongan II, 9,9 persen golongan IV dan sisanya 0,4 persen golongan I.

Pada tabel 2.3 berdasarkan jenis kelamin, terdapat 137 ASN atau 54 persen berjenis kelamin laki-laki di DKP Sulteng dan sisanya 116 ASN atau 46 persen berjenis kelamin perempuan tersebar di 5 bidang dan 3 UPTD. Jumlah pegawai laki-laki terbesar ada pada UPT Pelabuhan Perikanan dengan 48 orang dibandingkan pegawai perempuan sebanyak 37 orang, sementara Bidang/UPTD yang memiliki jumlah pegawai perempuan lebih banyak daripada pria adalah Bidang Budidaya dan P2HP yaitu 62 persen dari jumlah 21 ASN, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dengan 60 persen dari jumlah 28 ASN, serta UPTD Penerapan Mutu dan Hasil Perikanan sebanyak 73 persen dari 19 ASN.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui jalur “gelar” dan “non gelar”, untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.

Penempatan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah disesuaikan dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang terbagi pada bidang dan UPT pada lingkup dinas.

2.1.2.2 Aset yang dikelola

Guna Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selain Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan didalam mengemban tugas dan fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun daftar Inventaris/sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Aset Tetap Per 30 Juni 2025

No	Uraian	Nilai (Rp.)	Keterangan
1	Tanah	35.108.468.080	Bahwa asset tersebut berada pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Undata No. 7 Palu, UPTD Pelabuhan Perikanan, UPTD PMHP dan UPTD Balai Perbenihan Perikanan
2	Peralatan dan Mesin	55.452.293.484	
3	Gedung dan Bangunan	100.887.198.091	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.767.309.165	
5	Aset tetap lainnya	1.139.821.321	
6	Konstruksi dalam pengerjaan	1.526.101.616	
JUMLAH		253.881.191.757	

Sumber : Subbagian Keuangan dan Asset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (2025)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran pada Renstra 2021-2026 rata-rata mencapai target yang telah ditentukan. Namun, masih terdapat capaian kinerja beberapa indikator yang dirasa belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan besaran anggaran serta realisasi pendanaan tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja												Rata-rata Target RPJMD	Interpretarsi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui(>)
		2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
2.2	**Urusan Pilihan**														
2.2.10	Perikanan														
2.2.10.1	Produksi Perikanan (ton)	1.473.544	939.907,08	63,78	1.474.775,26	921.126,39	62,46	972.693,75	1.137.029,68	116,89	1.013.199,14	1.075.236,41	106,12	1.233.553,04	>
	Persentase Produksi (%)	100	63,78	63,78	100	62,46	62,46	100	116,89	116,89	100	104,92	104,92	100	>
	- Produksi perikanan budidaya	1.221.858	731.966,58	59,91	1.223.089,22	696.328,60	56,93	720.000	763.520,32	106,04	760.000,00	803.370,46	105,71	981.237	<
	- Produksi perikanan tangkap	251.686	207.940,50	82,62	251.686,04	224.797,79	89,32	252.693,75	373.509,36	147,81	253.199,14	271.865,95	107,37	252.316	>
2.2.10.1	Produksi Perikanan yang diolah (Kg)	5.928.300	5.507.771	92,91	4.149.810	13.079.321,50	315,18	6.535.950	6.432.115	98,41	6.862.748	6.844.871	99,74	5.869.202	<
2.2.10.2	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/th)	53,83	67,07	124,60	55,39	67,39	121,66	57,05	71,85	125,94	72,40	74,72	103,20	59.67	>
2.2.10.3	Kontribusi Sektor Perikanan thd PDRB (ADH Berlaku, %)	4,68	3,72	79,49	4,68	3,10	66,24	4,79	3,06	63,88	4,95	3,06	61,82	4,78	<
2.2.10.4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	54,15	64,54	119,19	59,89	40,62	67,82	67,77	56,87	83,92	76,72	66,26	86,37	64,63	<
2.2.10.5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)	0,26	0,26	100,00	0,26	0,35	134,62	0,27	0,48	177,78	0,28	0,66	235,71	0,27	>
2.2.10.6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	< 50%	< 50%	100	< 50%	< 50%	100	< 60%	< 60%	100	< 60%	< 60%	100	<55%	>
2.2.10.7	Nilai Tukar Nelayan	108,76	103,27	94,95	100,00	104,40	104,40	102,00	104,04	102,00	103,00	93,58	90,85	103,44	<
	Nilai Tukar Pembudidaya	87,00	99,94	114,87	98,00	105,12	107,26	100,50	101,12	100,62	101,12	92,01	91,10	96,66	<
2.2.10.8	Penanganan kasus pelanggaran bidang KP (kasus)	86	86	100,00	87	87	100,00	88	150	170,45	89	110	123,60	88	>
2.2.10.9	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari operasi)	150	150	100,00	200	228	114	250	265	106	300	277	92,33	225	>
2.2.10.10	Rasio Kawasan Lindung Perairan thd Total Luas	0,1849	0,1849	100,00	19,14	18,22	95,19	19,98	18,22	91,19	0,1847	0,1891	102,38		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja												Rata-rata Target RPJMD	Interpretarsi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui(>)
		2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
2.2	Urusan Pilihan														
	Perairan Teritorial (angka)														

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	21	22
Pendataan Daerah															
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp12.458.228.000	Rp7.289.000.000	Rp14.788.400.000	Rp4.944.324.000	Rp12.975.954.500	Rp6.088.567.250	Rp15.160.212.850	Rp4.910.880.550	1.04	0.83	1.02	0.99	-26.51%	-27.67%
2	Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-
3	Dana Alokasi Khusus	Rp12.368.122.000	Rp23.900.968.000	Rp27.535.886.000	Rp17.014.547.000	Rp10.676.314.308	Rp22.466.282.271	Rp25.545.249.464	Rp16.030.736.107	0.86	0.93	0.92	0.94	11.22%	121.51%
4	Belanja Operasi	Rp62.755.865.216	Rp73.771.047.063	Rp67.439.759.153	Rp72.884.951.404	Rp57.296.195.964	Rp66.906.254.351	Rp62.551.550.885	Rp67.279.840.382	0.91	0.90	0.92	0.92	5.11%	5.50%
5	Belanja Modal	Rp10.898.051.913	Rp25.577.662.702	Rp30.968.751.785	Rp4.762.153.442	Rp10.236.891.628	Rp23.999.177.764	Rp28.969.316.369	Rp4.694.344.549	0.94	0.94	0.94	0.99	63.49%	-22.89%
6	**Total**	**Rp98.480.267.129**	**Rp130.538.677.765**	**Rp140.732.796.938**	**Rp99.605.975.846**	**Rp91.185.356.400**	**Rp119.460.281.636**	**Rp132.226.329.568**	**Rp92.915.801.588**	**0.93**	**0.92**	**0.94**	**0.93**	**0.38%**	**0.63%**

Sumber: Data Anggaran Dislutkan Sulteng, Subbag Keuangan dan Aset (2025)

Secara garis besar, hasil pencapaian *outcome* bidang kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1) Produksi perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sepanjang tahun 2021-2024, rata-rata produksi perikanan Sulawesi Tengah mengalami kenaikan. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi komoditas rumput laut pada perikanan budidaya yang menjadi komoditas utama dan penyumbang produksi perikanan terbesar Sulawesi Tengah.

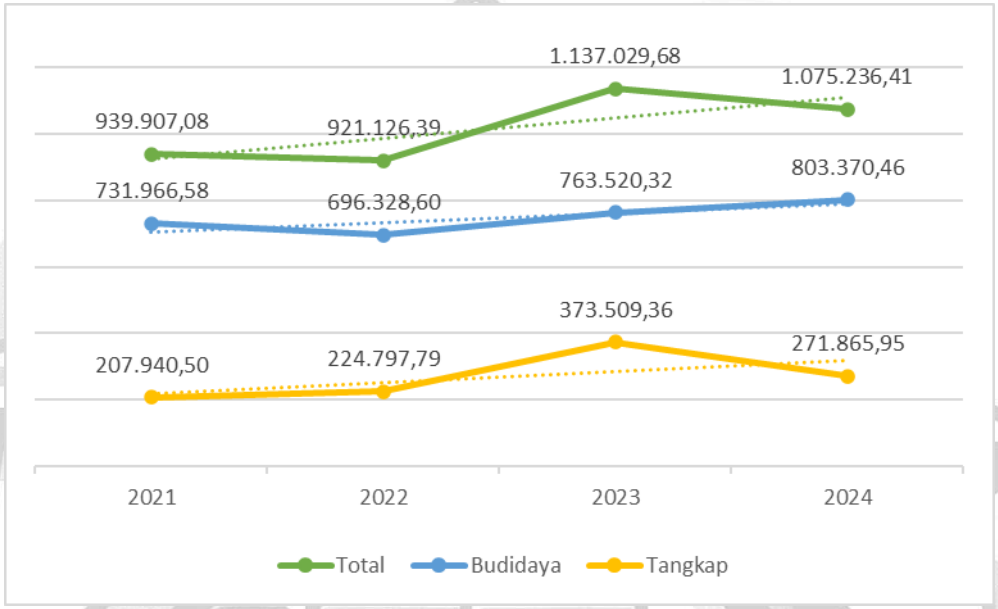

Gambar 2.6.
Grafik Series Produksi Perikanan Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024*

*) Angka sementara
Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya meliputi budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya karamba dan budidaya sawah. Komoditi unggulan perikanan budidaya Sulawesi Tengah adalah rumput laut, udang dan ikan air tawar (nila, mas dan lele). Sepanjang 2021-2024, capaian produksi perikanan budidaya berkisar antara 56,93 sampai dengan 106,04. Capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 106,04 dan terendah 56,93 di tahun 2022, yang merupakan angka sementara. Dominasi produksi yang cukup besar terdapat pada pengembangan komoditi rumput laut, yaitu *Euchema cottoni* yang banyak diusahakan pada budidaya laut dan *Glacillaria* sp. yang diusahakan pada budidaya tambak. Capaian produksi perikanan terbesar

berasal dari Banggai Kepulauan dimana rumput laut merupakan penyumbang lebih dari 90% produksi budidaya Banggai Kepulauan.

Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap meliputi perikanan laut dan perairan umum daratan (PUD). Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021-2024 berkisar antara 82,62-147,81. Bila meninjau tabel diatas, realisasi dan capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021-2024 cenderung menunjukkan angka positif. Cuaca dan keterbatasan sarana prasarana merupakan faktor utama dari berfluktuasinya produksi perikanan tangkap.

2) Pada tahun 2021-2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan target capaian terhadap produksi perikanan yang diolah.

   Berdasarkan data pada tabel produk olahan yang dihasilkan oleh pengolah Sulawesi Tengah, realisasi terjadi secara fluktuatif dengan peningkatan tajam di tahun 2022, kemudian mengalami penurunan dan peningkatan secara gradual hingga 2024.

3) Berdasarkan penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) menggunakan 4 (empat) kelompok jenis ikan dan udang segar/basah, kelompok ikan dan udang awetan dan kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan untuk penghitungan angka konsumsi ikan. Untuk kelompok ikan dan udang awetan, kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan dikonversi ke dalam bentuk ikan setara segar. Kebutuhan terbesar ikan konsumsi rumah tangga antara lain ikan tongkol/tuna/cakalang, selar, ekor kuning, kembung, cumi-cumi/sotong/gurita, udang/lobster, teri, bandeng, nila, mujair.

   Angka konsumsi makan ikan sepanjang 2021-2024 setiap tahunnya menunjukkan progress positif. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan ini salah satunya merupakan dampak dari publisitas produk perikanan kelautan dan kampanye gemar makan ikan disamping imbas dari Sulawesi Tengah yang merupakan daerah pesisir dimana ikan merupakan salah satu komoditas utama.

4) Pada tahun 2021-2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah belum menetapkan Kontribusi Subsektor Perikanan Sulawesi Tengah terhadap PDRB Sulawesi Tengah (harga berlaku).

5) Bina kelompok nelayan, sesuai pengertian dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan persentase dari jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan

dari Pemerintah Daerah dibagi jumlah kelompok nelayan yang ada. Pada tahun 2021-2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah belum menetapkan persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan.

6) Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan jumlah produksi perikanan tangkap hasil kontribusi kelompok nelayan dibagi jumlah total produksi daerah. Adapun pada tahun 2021-2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah belum mencanangkan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan.
7) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman merupakan persentase dari jumlah hasil tangkapan dibagi 80% dari jumlah potensi lestari maksimum. Rata-rata capaian proporsi tangkapan ikan Sulawesi Tengah belum ditentukan pada tahun 2021-2014, sehingga masih perlu dikaji lebih lanjut terkait proporsi perkomoditas.
8) Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu proksi indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani/ nelayan/pembudidaya dari waktu ke waktu. NTP di atas angka 100 dapat diartikan bahwa petani/nelayan/pembudidaya mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTP sama dengan 100 berarti petani/nelayan/pembudidaya mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTP di bawah 100 berarti petani/nelayan/pembudidaya mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib).

   Pencapaian nilai tukar pembudidaya mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 dengan realisasi 105,12, serta nilai terendah di tahun 2024 yaitu 92,01. Berdasarkan data BPS Sulteng, kenaikan Nilai Tukar Pembudidaya cukup besar terutama pada pendapatan yang diterima pada pembudidaya ikan air tawar yang mana merupakan andil dari usaha budidaya air tawar yang mulai menggeliat.

   Pada tahun 2021-2024 pencapaian nilai tukar nelayan terus meningkat di atas angka 100, lalu menurun di tahun 2024. Adapun faktor penyebab fluktuatif pada NTP Perikanan, antara lain (1) kemampuan dalam produksi komoditas perikanan yang berdaya saing tinggi masih rendah. Hal ini disebabkan hasil tangkapan ikan per

satuan upaya cenderung tak menentu; (2) keterbatasan dalam memasarkan hasil tangkapan dan budidaya, baik pasar dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, harga komoditas yang cepat berubah dan rentan mengalami *market glut. Market glut* adalah suatu kondisi pasar dengan harga jual menurun drastis ketika pasokan (*supply*) melimpah; (3) keterbatasan ketersediaan benih dan indukan unggul, baik segi jumlah dan aksesibilitas; (4) faktor produksi lainnya yang relatif mahal, seperti alat tangkap, mesin kapal, dan keterbatasan ketersediaan BBM bersubsidi pada depot SPBU dan SPDN sehingga berpengaruh pada hari operasi; (5) serta kondisi cuaca yang ekstrem di wilayah Sulawesi Tengah berpengaruh pada usaha-usaha perikanan.

9) Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berasal dari jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang diperiksa dibagi jumlah pelaku usaha yang diperiksa. Rata-rata rasio persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berada diatas 1 (satu) atau melebihi dari target yang ditetapkan. Nihilnya kasus dalam kurun waktu 2021–2024 dapat mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi, efektivitas pengawasan, atau kemungkinan belum adanya laporan yang masuk. Adapun jumlah hari operasi pengawasan SDKP yang terealisasi adalah 228 hari pada tahun 2022 dan 265 di tahun 2023.
10) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial terdata pada tahun 2021-2024 adalah sebesar 18,22 persen dengan luas kawasan lindung perairan adalah sebesar 1,3 juta Ha dari luas perairan territorial sebesar 77.295,9 Km^2.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan umum, dilakukan melalui pemberian pelayanan perizinan, pelayanan penjualan benih, benur dan ikan konsumsi, pelayanan umum kenelayanan, pemberian data dan informasi publik terkait bidang kelautan dan perikanan serta pelayanan terkait pengembangan usaha lainnya. Dalam pelaksanaan pelayanan terutama pelayanan perijinan, Dislutkan Provinsi bermitra dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

- **Bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP, Pengelolaan Ruang Laut; dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan** menangani masalah perijinan dan non perijinan, yaitu:
  1) Surat Perizinan Berusaha 5-30 GT (penerbitan SIUP, SIKPI/SIPI)
  2) Penerbitan Buku Kapal Elektronik (e-BKP)
  3) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
  4) Penerbitan Surat Kelaikan Operasi Kapal Perikanan (SLO)
  5) Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
  6) Perizinan Budidaya Laut s.d. 12 mil dan budidaya lintas kabupaten/kota
  7) Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
  8) Pelayanan Verifikasi Pengajuan NIB dan Sertifikasi Standar Pengolahan dan Pemasaran
  9) Penerbitan Rekomendasi BBM bagi Nelayan
  10) Perizinan Penampungan dan Penyaluran Air Minum (Pemanfaatan Air Laut selain untuk Energi)
  11) Perizinan Penampungan dan Penyaluran Air Baku (Pemanfaatan Air Laut selain untuk Energi)
  12) Perizinan Penyiapan Lahan melalui Pembukaan Lahan untuk Reklamasi
- UPT PMHP (Penerapan Mutu Hasil Perikanan), UPT Balai Perbenihan Perikanan dan UPT Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; melayani masalah non perizinan:

  UPT PMHP
  1) Uji mutu hasil perikanan

  UPT Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  2) Layanan penjualan es balok di PPI
  3) Pelayanan tambat labuh kapal
  4) Sewa *mess* nelayan andon

  UPT Balai Perbenihan Perikanan
  5) Layanan Penjualan Benih Ikan

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pelayanan-pelayanan baik perijinan maupun non perijinan dimana kelompok sasaran pelayanan adalah pelaku usaha kelautan perikanan yang antara lain terdiri dari :

- Nelayan
- Pembudidaya Ikan
- Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan
- Petambak Garam
- Masyarakat Pengawas Perikanan, dan
- Masyarat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Stakeholder kelautan dan perikanan lainnya

Sampai dengan tahun 2024, jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terdata pada Dislutkan Provinsi baik berdasarkan data statistik maupun data monev:

Tabel 2.7 Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Perikanan Per Juni 2025

No	Pelaku Usaha	Jumlah
1	Nelayan	94.887 orang
2	Kelompok Nelayan	3.432 kelompok
3	Pembudidaya	35.900 orang
4	Kelompok Pembudidaya	44 kelompok
5	Pengolah	932 orang
6	Kelompok Pengolah	338 kelompok
7	Pemasar	803 orang
8	Kelompok Pemasar	287 kelompok
9	Petambak Garam	156 orang
10	Kelompok Usaha Garam	16 kelompok
11	Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan	159 kelompok

2.1.5 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) berperan penting dalam mendukung pelayanan pemerintah daerah melalui kontribusi pembangunan daerah dengan berbagai cara, seperti meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan. BUMD juga berfungsi sebagai instrumen pemerintah daerah untuk

mencapai tujuan sosial-ekonomi dan pembangunan, termasuk meningkatkan layanan publik dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha.

Dalam pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2024 Dislutkan Provinsi Sulawesi Tengah belum melakukan kerjasama dengan BUMD, namun kedepannya diharapkan dapat terjalin kerjasama dalam pencapaian kinerja terutama mewujudkan program daerah dalam rangka Berani Tangkap Banyak, antara lain melalui kerjasama fasilitasi pendanaan bagi usaha kelautan perikanan termasuk dalam hal pengadaan kapal bagi penangkapan ikan.

2.1.6 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah

Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Dalam upaya mendorong pemerintah daerah menerapkan kerja sama daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kerjasama antar daerah merupakan salah satu agenda strategis pembangunan daerah. Dengan membangun kerjasama antar daerah dapat mengurangi disparitas dengan meningkatkan potensi ekonomi daerah, saling melengkapi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.8 Daftar Kerjasama Daerah sampai dengan Tahun 2025

No	Naskah Perjanjian	Hasil Pelaksanaan	Manfaat Bagi Pemerintah Daerah	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
1	Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Perairan Sekitarnya	Dukungan kegiatan antara kedua pihak dalam Pengelolaan KKP3K Banggai Dalaka	Mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya yang efektif	1. Pemantauan habitat & Populasi ikan 2.Perlindungan & rehabilitasi habitat & populasi ikan 3.Peningkatan SDM 4.Peningkatan Pengawasan KK 5.Pengembangan system pendanaan berkelanjutan 6.Pengumpulan dan pengembangan data & informasi 7. Pembentukan jejaring konservasi
2	Pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) Banggai Area VI dan VII	1. Pengumpulan data CPUE2. Pembentukan Pokmaswas3.- Pendidikan anak pesisir- pelatihan awal diving DSD- kursus bahasa inggris bagi anak-anak dan orang tua- kursus berenang dan snorkeling bagi anak-anak4.- Pengawasan KK- sosialisasi terkait API dan APBI yang di larang kepada kelompok nelayan - sosialisasi rutin ttg peraturan kkp3k banggai dalaka 5.-Pemanfaatan dan pengolahan sampah- pelajaran terkait penanggulangan sampah kepada ibu2 rumah tangga6.Pengangkutan sampah7.Monitoring terumbu karang, Biota mega benthos, Lamun dan Mangrove8. - Sosialisasi KKP3K Banggai Dalaka Area VI dan VII- Brosur kkp3k - pembagian peta kkp3k banggai di balai desa sekitar- Pengumpulan data produksi sampah, data CPUE, data nelayan yang beraktifitas saat pengawasan di laut, data penduduk nelayan, data nelayan gurita, data nelayan panah, data nelayan kapal purse seine9.Penyediaan Peta KKP3K10. Penyediaan Papan Informasi Jenis-jenis Biota Perairan yang dilindungi & terancam Punah di Sulawesi tengah	Mengimplementasikan Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia No 53/Kepmen-KP/2019 tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di area VI dan VII	1.Pemantauan habitat & Populasi ikan2.Perlindungan & rehabilitasi habitat & populasi ikan3.Peningkatan SDM4.Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat5.Penguatan social ekonomi masyarakat sekitar kawasan6.Penyediaan dan pemeliharaan sapras pengelolaan kawasan7..Peningkatan Pengawasan Kawasan Konservasi8..Pengembangan system pendanaan berkelanjutan9.Pengumpulan dan pengembangan data & informasi

No	Naskah Perjanjian	Hasil Pelaksanaan	Manfaat Bagi Pemerintah Daerah	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
3	Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Perairan Sekitarnya	1. Monitoring / Pemantauan dan pengawasan Ikan Banggai cardinalfish -keanekaragaman hayati yang terancam punah di Desa Bone Baru, Pulau Banggai 2.Monitoring habitat dan populasi gurita sebelum dan sesudah kegiatan penutupan sementara di lokasi dilakukannya penutupan sementara 3. Melakukan rehabilitasi terumbu karang dengan terumbu buatan dan transplantasi karang di tiga lokasi di Pulau Banggai dan Pulau Peleng 4. Pendampingan masyarakat dalam pengembangan penutupan sementara kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan gurita dan biota terumbu karang 5. Pelatihan Metode Pemantauan Terumbu Karang Buatan (Artificial Reef) untuk UPT KKP3K Banggai dan masyarakat 6. Pendampingan penguatan Yayasan KALI dan kelompok binaannya – Kopeling dalam pengorganisasian dan melaksanakan program konservasi	Mengimplementasikan Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia No 53/Kepmen-KP/2019 tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Perairan Kec. Banggai Utara Kab. Banggai Laut dan Perairan Kec. Totikum Selatan Kab. Banggai Kepulauan	1. Pemantauan habitat & Populasi ikan2.Perlindungan & rehabilitasi habitat & populasi ikan3.Peningkatan SDM4.Peningkatan Pemahaman dan kesadaran masyarakat5.Pengembangan penelitian dan pendidikan 6.Pengumpulan dan pengembangan data & informasi

No	Naskah Perjanjian	Hasil Pelaksanaan	Manfaat Bagi Pemerintah Daerah	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
4	Pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) Banggai Area XI Khusus Pulau Bakalan Banggai Kepulauan	1. Terjalin Kerjasama antara Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan adanya MOU2. Kelompok nelayan memiliki data pencatatan diwilayah subzona penangkapan ikan KKP3K. terdapat peningkatan pendapatan setelah dilakukan pencatatan.3. Adanya pertukaran informasi antara nelayan dan para pihak pemangku kepentingan di Banggai Kepulauan. Adanya kampanye dan publikasi cerita sukses capaian program oleh masing-masing mitra Burung Indonesia4. nelayan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mempraktekkan pembuatan produk perikanan.5. Terindentifikasinya kalender musim, wilayah tangkap dan alat tangkap gurita, beserta wilayah perlindungan laut di 3 Desa. Terdatanya teknik penanganan gurita, terpetakannya kondisi terumbu karang, teridentifikasi jenis mangrove di wilayah perlindungan laut, 6. Adanya video documenter terkait capaian program 7. Adanya peningkatan hasil tangkapan oleh nelayan, 31,62 Ha total terumbu karang di Zona XI KKP3K Dalaka disekitar pulau Bakalan Berhasil dipertahankan kelestariannya	Mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai, yaitu pada area XI Pulau Bakalan Banggai Kepulauan yang efektif	1.Pengumpulan dan pengembangan data dan informasi2.Pemantauan habitat dan populasi ikan3. Peningkatan Kapasitas SDM4.Peningkatan Pengawasan KK5.Pengembangan system pendanaan berkelanjutan
5	Program Perlindungan Penyu dan upaya mendukung perikanan skala kecil berkelanjutan di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Perairan Sekitarnya	1. Monitoring Ancaman Terhadap Penyu Sisik a. Survei Pasar dan Rantai Pasok Perdagangan : perdagangan yang ditemukan lebih rendah dibandingkan pengamatan sebelumnya di tahun 2020. Namun, penangkapan masih terus terjadi dilapangan.b. Monitoring perdagangan online : perdagangan online sedang dalam proses untuk dilaporkan kepada penyedia layanan agar iklan dapat diturunkan dari platform.2. Kampanye Keren Tanpa Sisika. Produksi Material Kampanye : Edukasi ke Sekolah (data hasil dari kuesioner masih dalam	Mengimplementasikan Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia No 53/Kepmen-KP/2019 tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Desa Semma Jatem Kec. Pagimana Kab, Banggai	1. Pemantauan(monitoring) dan pengumpulan data penyu di habitatnya2.Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian biota laut, khususnya penyu3.Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat4.Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan berbasis perikanan berkelanjutan dilokasi program.

No	Naskah Perjanjian	Hasil Pelaksanaan	Manfaat Bagi Pemerintah Daerah	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
		proses perekapan dan analisis untuk sementara), Workshop SEE Shell (aplikasi ini sangat membantu dalam mengindentifikasi produk sisik penyu, dan dapat menjadi sarana institusi untuk memantau aktivitas jual beli sisik di Sulawesi Tengah), Turtle Week "Pekan Penyu Banggai" : Talk Show di Radio (Talk Show ini dapat menyentuh secara luas ketingkatan masyarakat karna makin berkembang dan bertambahnya peminat media social yang ada di Kabupaten Banggai) , Bermain dan diskusi bersama Kimi (puluhan siswa ikut berkumpul di Ruang Terbuka Hijau Teluk Lalong dengan penuh antusias mengikuti kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai perlindungan penyu), Pemasangan Papan Informasi (memberikan penyadar tahuan ketingkatan masyarakat secara langsung serta mampu memutus eksploitasi penyu sisik), Pementasan Teater bersama Sanggar Teater Athena (edukasi perlindungan penyu secara langsung dengan menggunakan pertunjukan seni dihadiri oleh banyak pemuda), iklan Layanan Masyarakat (kampanye dilakukan secara langsung, media digital, stasiun radio, serta bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Banggai),3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat a. Lembaga Keuangan Mikro (memberikan pinjaman untuk kepentingan konsumsi dsb)b. Budidaya Pembesaran Kerapu dalam Keramba c. Budidaya Rumput Laut jenis Spinosum dan Cotoniid. Pengolahan Hasil Tangkapan Ikane. Inwater monitoring		

No	Naskah Perjanjian	Hasil Pelaksanaan	Manfaat Bagi Pemerintah Daerah	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
6	Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Perairan Sekitarnya	Dukungan kegiatan antara kedua pihak dalam Pengelolaan KKP3K Banggai Dalaka di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur dan area III Desa Lambangan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai	Mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya yang efektif khususnya pada area IX yang terletak di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur dan area III Desa Lambangan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai	1. Pemantauan habitat dan populasi Gurita dan Ikan Demersal2. Perlindungan & rehabilitasi habitat & populasi gurita dan ikan demersal3. Peningkatan Kapasitas SDM4. Peningkatan Pengawasan KK5. Pengembangan system pendanaan6. Pengumpulan dan pengembangan data dan informasi7. Pembentukan Kelompok Kerja dan Rencana Pengelolaan Gurita (RPP) Gurita
7	Pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) banggai, banggai laut, banggai kepulauan dan perairan sekitarnya	Dukungan kegiatan antara kedua pihak dalam Pengelolaan KKP3K Banggai Dalaka di Desa Monsongan Kab Banggai Laut	Mengimplementasikan Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia No 53/Kepmen-KP/2019 tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Desa Monsongan Kab Banggai Laut	1.Pemantauan populasi habitat ikan 2.Perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan 3.Peningkatan Kapasitas SDM 4.Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat 5.Penguatan Sosek 6.Penyediaan dan Pemeliharaan sapras KK 7.Peningkatan Pengawasan KK 8.Pengembangan Penelitian dan Pendidikan 9.Peningkatan pelayanan pemanfaatan kawasan untuk pariwisata dan perikanan berkelanjutan
8	Pelestarian Ekositem Laut yang berkelanjutan untuk kelestarian Microhabitat Ikan Banggai Cardinal Fish (CDF)	Dukungan kegiatan antara kedua pihak dalam Pengelolaan KKP3K Banggai Dalaka di Desa Bone Baru Kab Banggai Laut	Mengimplementasikan Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan Republik Indonesia No 53/Kepmen-KP/2019 tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Desa Bone Baru Kab. Banggai Laut	1.Pemantauan populasi habitat dan ikan BCF2.Perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan BCF3.Peningkatan Kapasitas SDM4.Penyediaan dan Pemeliharaan sapras KK5.Peningkatan Pengawasan KK6..Pengembangan Penelitian dan Pendidikan di Desa Bone Baru7. Pengumpulan dan Pengembangan data dan Informasi microhabitat BCF di Bonebaru
9	Andon Penangkapan Ikan	Penataan dan pengendalian nelayan andon antar 2 Provinsi	Untuk menertibkan dan mengedalikan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan andon sesui dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab dan tidak menimbulkan konflik nelayan	Pemberian ijin nelayan andon agar kegiatan penangkapan ikan dapat dilaksanakan secara tertib dan terkendali
10	Andon Penangkapan Ikan	Penataan dan pengendalian nelayan andon antar 2 Provinsi	Untuk menertibkan dan mengedalikan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan andon sesui dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab dan tidak menimbulkan konflik nelayan	Pemberian ijin nelayan andon agar kegiatan penangkapan ikan dapat dilaksanakan secara tertib dan terkendali

No	Naskah Perjanjian	Hasil Pelaksanaan	Manfaat Bagi Pemerintah Daerah	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
11	Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah	Pertukaran informasi dan dukungan personel antara kedua pihak yang semakin baik	Untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi dalam upaya peningkatan kesadaran, kepatuhan dalam rangka mewujudkan sinergi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah
12	Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan dan Pengembangan Sumbedaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah	Dukungan personel dan pertukaran informasi antara kedua pihak yang semakin baik	Peningkatan sinergitas DKP Provinsi Sulteng dengan Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulteng dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan Peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk dukungan terhadap pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulteng	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah
13	Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Morowali	Dukungan personel dan pertukaran informasi antara kedua pihak yang semakin baik	Dalam rangka mendukung operasional bersama untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas dan efisien pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Morowali	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kab Morowali
14	Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Buol	Dukungan personel dan pertukaran informasi antara kedua pihak yang semakin baik	Dalam rangka mendukung operasional bersama untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas dan efisien pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Buol	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kab Buol
15	Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banggai Laut	Dukungan personel dan pertukaran informasi antara kedua pihak yang semakin baik	Dalam rangka mendukung operasional bersama untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas dan efisien pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banggai Laut	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di kab Banggai Laut
16	Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tojo Una-una	Dukungan personel dan pertukaran informasi antara kedua pihak yang semakin baik	Dalam rangka mendukung operasional bersama untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas dan efisien pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tojo Una-una	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kab Tojo Una-Una

No	Naskah Perjanjian	Hasil Pelaksanaan	Manfaat Bagi Pemerintah Daerah	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
17	Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan	Dukungan personel dan pertukaran informasi antara kedua pihak yang semakin baik	Dalam rangka mendukung operasional bersama untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas dan efisien pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kab Banggai Kepulauan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah; maka beberapa hal terkait pengembangan pelayanan yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Melaksanakan pengaturan (*regulation*) terkait bidang kelautan dan perikanan;
b. Memberikan pelayanan umum (*public service*) terkait pengembangan usaha kelautan perikanan;
c. Menyelenggarakan pembangunan (*development*) di bidang kelautan dan perikanan;
d. Melakukan pemberdayaan (*empowering*) dan pembinaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Berkaitan dengan 4 (empat) poin diatas, jenis pelayanan umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

1. Melaksanakan pengaturan dilakukan melalui fasilitasi regulasi dan kebijakan bidang kelautan dan perikanan; dilakukan melalui penerbitan regulasi yang kondusif bagi iklim usaha masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan. Sampai dengan tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan telah memfasilitasi terbitnya Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan;
2. Memberikan pelayanan umum; dilakukan melalui pemberian pelayanan perizinan, pelayanan penjualan benih, benur dan ikan konsumsi, pelayanan umum kenelayanan, pemberian data dan informasi publik terkait bidang kelautan dan perikanan serta pelayanan terkait pengembangan usaha lainnya.
3. Menyelenggarakan pembangunan *(development)* di bidang kelautan dan perikanan.

Infrastruktur yang kuat merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Infrastruktur memegang peranan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi sub sektor kelautan dan perikanan.

Sampai saat ini DKP Sulteng terus menerus melakukan pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan baik melalui Dana APBD maupun yang berasal dari APBN. Infrasuktur tersebut tersebar di 13 Kabupaten/Kota, antara lain meliputi pembangunan sarana pemasaran dan pengolahan, sarana penunjang budidaya, sarana penunjang perikanan tangkap dan sarana penunjang pengawasan dan pengelolaan ruang laut.

Berdasarkan Kepmen KP Nomor 132/KEPMEN-KP/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, berikut Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Tengah Tahun 2024-2043:

Tabel 2.9
Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Tengah Tahun 2024-2043

No	Nama Pelabuhan	Kabupaten	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan*			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
1	PP. Donggala	Donggala	PPI	PPI	PPP	PPN
2	PP. Batusuya	Donggala	PP	PP	PPI	PPI
3	PP. Pangalaseang	Donggala	PP	PP	PPI	PPI
4	PP. Mapaga	Donggala	PP	PP	PPI	PPI
5	PP Taipa Palu (Calon PElabuhan	Palu	PP	PP	PPI	PPI
6	PP Malenge	Tojo Una-una	PP	PP	PPI	PPI
7	PP Toili	Banggai	PP	PP	PPI	PPI
8	PP Moilong	Banggai	PP	PP	PPI	PPI
9	PP Salakan	Banggai Kepulauan	PP	PP	PPI	PPI
10	PP Montop	Banggai Kepulauan	PP	PP	PPI	PPI
11	PP Liang	Banggai Kepulauan	PP	PP	PPI	PPI
12	PP Mato	Banggai Laut	PPI	PPI	PPP	PPP
13	PP Kolonodale	Morowali Utara	PPI	PPI	PPI	PPI
14	PP Baturube (Calon Pelabuhan)	Morowali Utara	PP	PP	PPI	PPI
15	PP Lafeu	Morowali	PP	PPI	PPI	PPI
16	PP Ungkea (Calon Pelabuhan)	Morowali	PP	PP	PPI	PPI
17	PP Bente (Calon Pelabuah)	Morowali	PP	PP	PPI	PPI
18	PP Ulunambo	Morowali	PP	PP	PPI	PPI
19	PP Moahino	Morowali	PP	PP	PPI	PPI
20	PP Petapa (Calon Pelabuhan)	Parigi Moutong	PP	PP	PPI	PPI
21	PP paranggi	Parigi Moutong	PPI	PPI	PPI	PPI
22	PP Gebang Rejo	Poso	PP	PP	PPI	PPI
23	PP Ampana	Tojo Una-una	PP	PP	PPI	PPI
24	PP Bahari (Calon Pelabuhan)	Tojo Una-una	PP	PP	PPI	PPI
25	PP Pagimana	Banggai	PPI	PPI	PPI	PPI
26	PP Balantak	Banggai	PP	PP	PPI	PPI
27	PP Bonebakal	Banggai	PP	PP	PPI	PPI
28	PP Bualemo	Banggai	PP	PP	PPI	PPI
29	PP Bunta	Banggai	PP	PP	PPI	PPI

No	Nama Pelabuhan	Kabupaten	Proyeksi Tahapan Pembangunan, Pengembangan dan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan*			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
30	PP Diapatih (Calon Pelabuhan)	Buol	PP	PP	PPI	PPI
31	PP Labuton (Calon Pelabuhan)	Buol	PP	PP	PPI	PPI
32	PP Kwala Besar (Calon Pelabuhan)	Buol	PP	PP	PPI	PPI
33	PP Ogotua	Tolitoli	PPP	PPP	PPP	PPN
34	PP Tandoleo	Tolitoli	PP	PP	PPI	PPI
35	PP Tanjung Sidoarjo (Calon Pelab)	Tolitoli	PP	PP	PPI	PPI
36	PP Laulalang	Tolitoli	PP	PP	PPI	PPI

Sumber : Kepmen KP Nomor 132/KEPMEN-KP/2023

Adapun kedepannya direncanakan untuk usulan pembaruan RIPPN di Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Usulan Pembaruan Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan
di Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Nama Pelabuhan Perikanan	Kab/ Kota	(Lokasi Pengambilan Tikor: Kantor/ Dermaga/ TPI/ Breakwater/ Lahan Calon Lokasi)	Status Pelabuhan Saat ini (Rencana Lokasi PP/ Sentra Nelayan/ PP)	Status Penetapan Kelas Oleh MKP (PPS/PPN/ PPP/PPI/Belum)	Proyeksi Pembangunan dan/atau Pengembangan (PPS/ PPN/ PPP/ PPI)	Status Verifikasi (diusulkan kembali / usulan baru/ dihapus)	Aset (BMD)		Kondisi Pelabuhan
								Kepemilikan (Pusat/ Provinsi/ KabKota)	Status P3D (sudah/ belum/tidak perlu P3D)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Batusuya	Donggala	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
2	Pangalaseang	Donggala	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
3	Donggala	Donggala	TPI	PP	PPI	PPN	Diusulkan Kembali	Provinsi	Sudah P3D	Operasional
4	Mepanga	Donggala	Kantor	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
5	Taipa Palu	Kota Palu	TPI	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kota	Belum P3D	Operasional
6	Malenge	Tojo Una-una	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Provinsi	Sudah P3D	Operasional
7	Toili	Banggai	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
8	Moilong	Banggai	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
9	Salakan	Banggai Kepulauan	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Provinsi	Sudah P3D	Operasional
10	Montop	Banggai Kepulauan	TPI	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
11	Liang	Banggai Kepulauan	TPI	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional

No	Nama Pelabuhan Perikanan	Kab/ Kota	(Lokasi Pengambilan Tikor: Kantor/ Dermaga/ TPI/ Breakwater/ Lahan Calon Lokasi)	Status Pelabuhan Saat ini (Rencana Lokasi PP/ Sentra Nelayan/ PP)	Status Penetapan Kelas Oleh MKP (PPS/PPN/ PPP/PPI/Belum)	Proyeksi Pembangunan dan/atau Pengembangan (PPS/ PPN/ PPP/ PPI)	Status Verifikasi (diusulkan kembali / usulan baru/ dihapus)	Aset (BMD)		Kondisi Pelabuhan
								Kepemilikan (Pusat/ Provinsi/ KabKota)	Status P3D (sudah/ belum/tidak perlu P3D)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Kalumbatan	Banggai Kepulauan	Lahan Calon Lokasi	PP	Belum	PPI	Usulan Baru	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
13	Mato	Banggai Laut	TPI	PP	PP	PPI	Diusulkan Kembali	Provinsi	Sudah P3D	Operasional
14	Kolonodale	Morowali Utara	TPI	PP	PP	PPI	Diusulkan Kembali	Provinsi	Sudah P3D	Operasional
15	Baturube	Morowali Utara	TPI	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Tidak
16	Lafeu	Morowali	TPI	PP	PP	PPI	Diusulkan Kembali	Provinsi	Sudah P3D	Operasional
17	Ungkea	Morowali Utara	Calon Lokasi	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Tidak
18	Matano	Morowali	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
19	Ulunambo	Morowali	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
20	Moahino	Morowali	Dermaga	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
20	Petapa	Parigi Moutong	Kantor	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
21	Kampal	Parigi Moutong		Sentra Nelayan	Belum	PPI	Usulan Baru	Kabupaten	Belum P3D	
22	Paranggi	Parigi Moutong	TPI	PP	PPI	PPI	Diusulkan Kembali	Provinsi	Sudah P3D	Operasional
23	Gebang Rejo	Poso	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Provinsi	Sudah P3D	Operasional
24	Ampana	Tojo Una-una	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
25	Bahari	Tojo Una-una	TPI	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
26	Pagimana	Banggai	TPI	PP	PPI	PPI	Diusulkan Kembali	Provinsi	Sudah P3D	Operasional
27	Balantak	Banggai	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
28	Bonebakal	Banggai	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
29	Bualemo	Banggai	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
30	Bunta	Banggai	TPI	PP	Belum	PPI	Diusulkan	Kabupaten	Belum P3D	Operasional

No	Nama Pelabuhan Perikanan	Kab/ Kota	(Lokasi Pengambilan Tikor: Kantor/ Dermaga/ TPI/ Breakwater/ Lahan Calon Lokasi)	Status Pelabuhan Saat ini (Rencana Lokasi PP/ Sentra Nelayan/ PP)	Status Penetapan Kelas Oleh MKP (PPS/PPN/ PPP/PPI/Belum)	Proyeksi Pembangunan dan/atau Pengembangan (PPS/ PPN/ PPP/ PPI)	Status Verifikasi (diusulkan kembali / usulan baru/ dihapus)	Aset (BMD)		Kondisi Pelabuhan
								Kepemilikan (Pusat/ Provinsi/ KabKota)	Status P3D (sudah/ belum/tidak perlu P3D)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kembali			
31	Diapati	Buol	TPI	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
32	Labuton	Buol	TPI	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
33	Kwala Besar	Buol	TPI	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
34	Ogotua	Toli-Toli	TPI	PP	PPP	PPN	Diusulkan Kembali	Provinsi	Sudah P3D	Operasional
35	Tandoleo	Toli-Toli	TPI/Kantor	PP	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
36	Tanjung Sidoarjo	Toli-Toli	Lahan	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
37	Laulalang	Toli-Toli	Calon Lokasi	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Diusulkan Kembali	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
38	Nambo	Morowali	TPI	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Usulan Baru	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
37	Sambalagi	Morowali	TPI	Sentra Nelayan	Belum	PPI	Usulan Baru	Kabupaten		Operasional
39	Umbele	Morowali		Sentra Nelayan	Belum	PPI	Usulan Baru	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
40	Luwuk	Banggai		Sentra Nelayan	Belum	PPI	Usulan Baru	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
41	Tambarana	Poso		Sentra Nelayan	Belum	PPI	Usulan Baru	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
42	Moutong	Parigi Moutong		Sentra Nelayan	Belum	PPI	Usulan Baru	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
43	Tinombo	Parigi Moutong		Sentra Nelayan	Belum	PPI	Usulan Baru	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
44	Kumaligon	Buol		PP	Belum	PPI	Usulan Baru	Kabupaten	Belum P3D	Operasional
45	Ambesia	Parigi Moutong		Sentra Nelayan	Belum		Usulan Baru	Kabupaten	Belum P3D	

Catatan : Blok merah dikeluarkan dari usulan, Blok kuning belum ada update data dari kabupaten
Sumber : Bidang Perikanan Tangkap, 2025

Rencana Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan :

1. Peningkatan Infrastruktur Perikanan Tangkap. Pembangunan diarahkan pada pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan di Teluk Tomini, Teluk Tolo, dan Parigi Moutong sebagai pusat pendaratan dan distribusi hasil tangkapan. Modernisasi kapal nelayan kecil dan menengah juga menjadi prioritas dengan penerapan desain ramah lingkungan dan standar keselamatan. Selain itu, dilakukan

penyuluhan terkait kuota penangkapan di WPPNRI 713, 714, 715, dan 716, serta pendampingan pengelolaan kapal agar tetap produktif dan tidak mangkrak.

2. Penguatan Sistem Logistik dan Rantai Dingin. Upaya utama adalah memperluas dan memperkuat prasarana *cool chain system* berupa *cold storage*, gudang beku, pabrik es, dan transportasi rantai dingin di sentra produksi seperti Parigi Moutong, Banggai, dan Donggala. Program ini dilengkapi dengan penguatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk menjaga ketahanan pasokan serta stabilisasi harga ikan antarwilayah.
3. Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perbenihan. Pembangunan budidaya difokuskan pada penerapan teknologi bioflok dan biotren (Bioflok Pesantren) untuk skala rumah tangga dalam mendukung ketahanan pangan. Selain itu, dilakukan intensifikasi tambak semi-intensif, pengembangan rumput laut kultur jaringan, serta rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Tulo dan Kampal guna menjamin ketersediaan benih unggul dan berkualitas.
4. Pengolahan, Pemasaran, dan Peningkatan Nilai Tambah. Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI), rumah pengeringan, dan pasar ikan higienis di Palu, Luwuk, dan Tolitoli ditargetkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Program ini juga dilengkapi dengan pengembangan Kampung Merah Putih Nelayan dan Budidaya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat pesisir. Sementara itu, pemanfaatan teknologi digital melalui *e-marketplace* dan *e-logbook* diharapkan dapat memperluas akses pasar serta memperkuat sistem tata kelola perikanan.
5. Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir. Upaya konservasi difokuskan pada rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun di Kepulauan Togean dan Teluk Tomini sebagai langkah menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Implementasi Program Bulan Cinta Laut (BCL) juga didorong untuk meningkatkan partisipasi nelayan dan masyarakat pesisir dalam menjaga kebersihan laut melalui sistem bank sampah. Selain itu, rehabilitasi wilayah pesisir yang rusak akibat aktivitas manusia maupun bencana dilakukan sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.
6. Penguatan Tata Kelola dan Regulasi. Perencanaan sektor kelautan dan perikanan akan berbasis data yang akurat melalui pembaruan secara berkala, sehingga setiap kebijakan lebih tepat sasaran. Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan kabupaten/kota, dilakukan dalam validasi DTKS serta pelaporan balik terhadap bantuan yang diberikan. Di sisi regulasi, pemerintah daerah didorong untuk

menyusun instrumen hukum yang memperkuat fiskal, termasuk penerapan sanksi atau denda atas pelanggaran. Penegakan aturan dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran awal, pendampingan perbaikan dokumen izin, hingga sanksi tegas apabila pelanggaran tetap berlanjut.

7. Melakukan pemberdayaan (*empowering*) dan pembinaan masyarakat kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melakukan penganggaran terkait pembinaan bagi Pengolah, Pemasar, KUB, Pokdakan, Pokmaswas maupun kelompok masyarakat pesisir lainnya. Kegiatan pembinaan antara lain meliputi, pendampingan, pemberian bimbingan teknis dan pelatihan, pemberian fasilitasi bagi peningkatan kualitas usaha antara lain dengan fasilitasi penerbitan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), CBIB, CPIB, Asuransi Nelayan dan SeHaT (Sertifikasi Hak atas Tanah).

Dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan menghadapi berbagai dinamika permasalahan yang timbul. Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

Tabel 2.11 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumberdaya kelautan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun sumberdaya lautnya yang besar	Kualitas SDM Pelaku usaha kelautan perikanan yang relatif rendah;	Peningkatan kualitas daya saing SDM, dan peningkatan layanan serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan (transformasi sosial).	Perkembangan demografi global	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja salah satunya karena *mismatch* antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan;	Kualitas Sumberdaya Manusia
	Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha;	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal (transformasi ekonomi).	Geo politik dan Geo ekonomi	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berlmalitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang tingkat kemiskinan;	Daya saing sub sektor kelautan dan perikanan
	Penggunaan teknologi yang masih sederhana dan tradisional		Perkembangan Teknologi	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah	
	Terbatasnya sarana prasarana dan infrastruktur kelautan perikanan yang memadai		Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Perpindahan Ibu Kota Negara	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam (gempa, tsunami, banjir dan likuifaksi)	

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sistem Pendataan dan Informasi yang belum terintegrasi		Perubahan Iklim	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah;	
	sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Sistem pendataan dan akses informasi yang masih terbatas	
	Keterbatasan BBM bersubsidi dan es					
	Penanganan Ikan di atas kapal dan pasca panen yang masih konvensional					
	Terbatasnya akses pemasaran dan permodalan bagi pelaku usaha kelautan perikanan					
	Masih maraknya IUU Fishing	Peningkatan ketahanan ekologi, mitigasi dan kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim				Pengawasan SDKP dan Ancaman degradasi lingkungan
	Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan yang tidak seimbang					
	Regulasi yang berubah-ubah	Peningkatan penyelenggaraan tata				Inkonsistensi Regulasi

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kelola pemerintahan				
	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal					

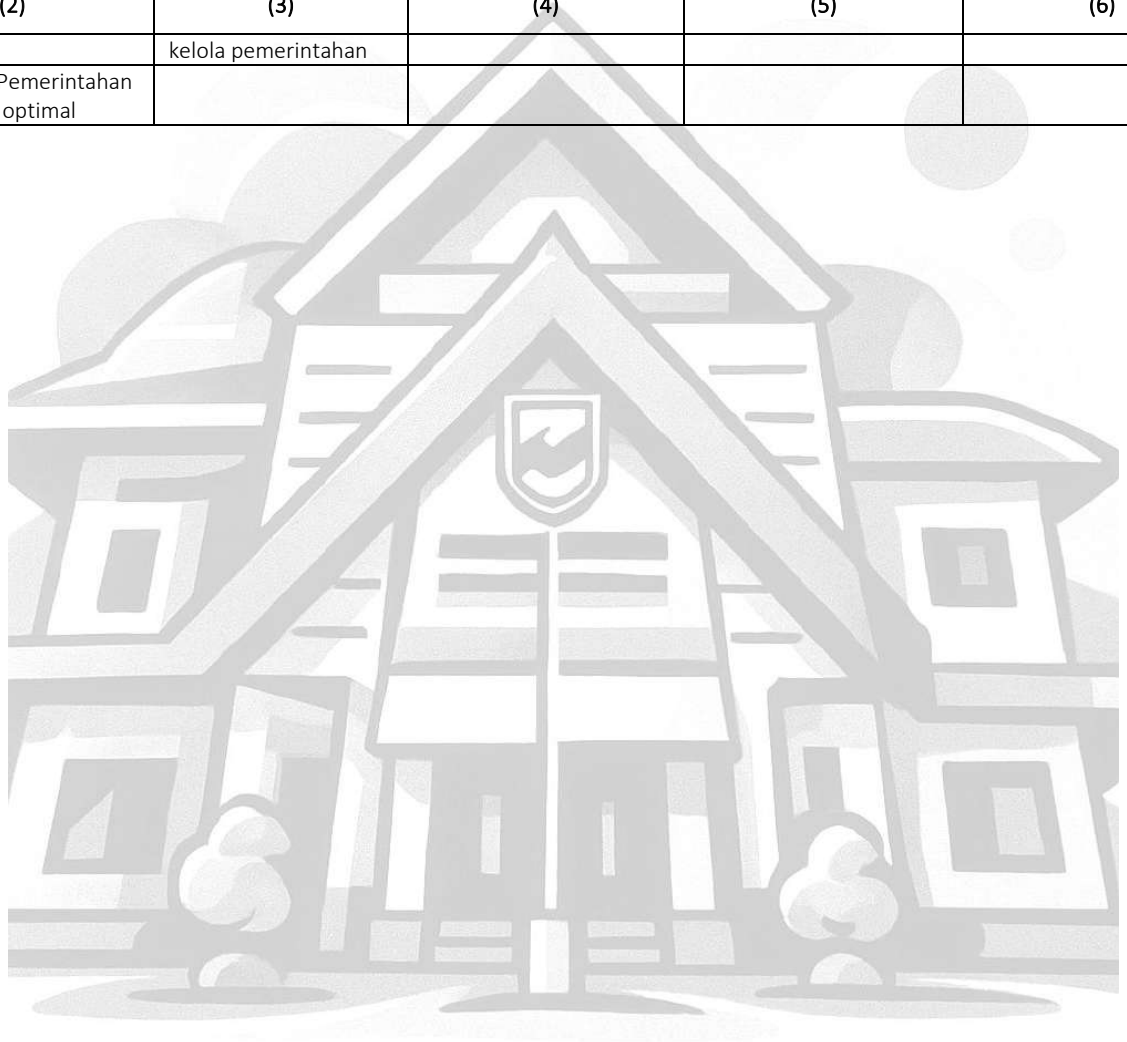

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Visi Indonesia 2025-2029 adalah **"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"** yang dituangkan dalam 8 (delapan) misi yang dikenal sebagai **Asta Cita**: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (3) Melanjutkan pengembangan infrastrukturdan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dan (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta cita tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029 yaitu **"Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas"** dan dijabarkan dalam 3 (tiga) konsep: (1) Melindungi Laut dan Sumberdayanya (2) Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah Lingkungan dan (3) Menjaga Kelestarian Wilayah Laut dan diimplementasikan dalam 5 (lima) kebijakan utama:

(1) Memperluasi kawasan konservasi laut
(2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
(3) Pembangunan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
(4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
(5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

dimana kesemuanya itu bertujuan untuk "Memperluas perlindungan, mengurangi tekanan/ dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan layanan ekosistemnya dan serapan karbon".

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri menerjemahkan Visi Indonesia tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045, yaitu "Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" yang menjadi pijakan dalam penentuan arah kebijakan 2025-2029 dimana Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus bertransformasi menjadi pusat ekononi global di Kawasan Timur Indonesia dengan pembangunan antar wilayah yang merata, peningkatan pelayanan publik yang inovatif dan didukung oleh ketersediaan sarana prasarana (infrastruktur) serta sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi, berdaya saing, inovatif, dan memiliki derajat kesehatan yang baik serta kondisi kehidupan sosial yang harmoni yang juga melaksanakan aktivitas ekonomi hijau, ekonomi biru dan bioekonomi secara lestari dan seimbang serta melaksanakan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ketangguhan Masyarakat Sulawesi Tengah terhadap bencana. Hal ini akan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang aman, nyaman dan produktif serta layak huni.

Berangkat dari hal tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menetapkan visi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu:

"Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029"

Dimana visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi :

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan Kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja

2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan religius nilai dan kearifan lokal.

Dari keempat misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sektor kelautan dan perikanan masuk dalam misi 2 dan misi 3 yang digambarkan sebagai berikut:

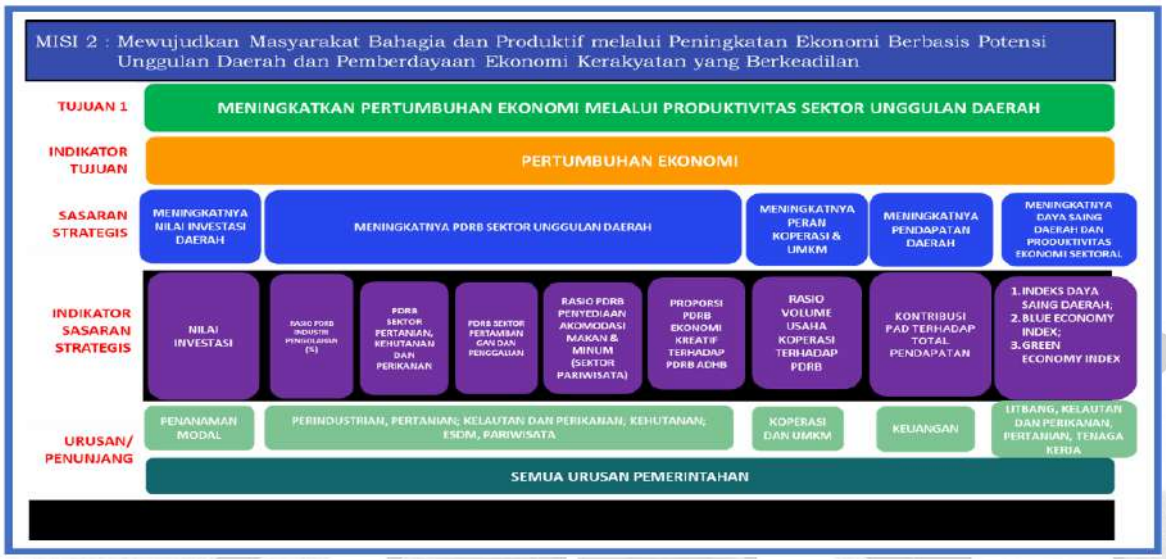

Gambar 3.1
Logframe Misi 2

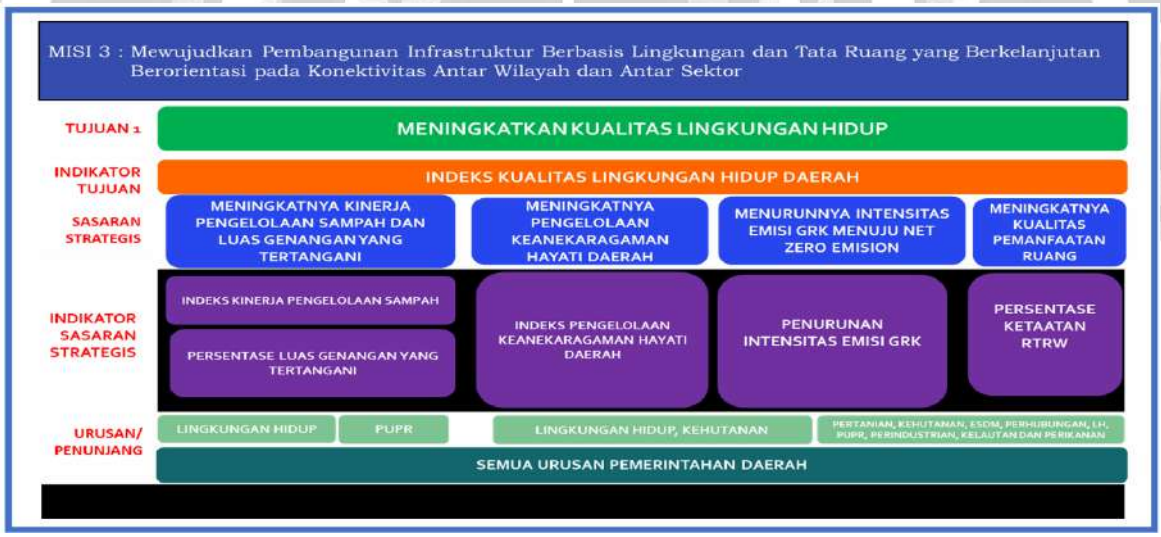

Gambar 3.2
Logframe Misi 3 Tujuan 1

Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah dengan memperhatikan sasaran-sasaran strategis pada RPJMD ditetapkan Tujuan pencapaian jangka menengah yaitu :

Meningkatkan PDRB, Produktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Pemanfaatan Ruang Sektor Kelautan Perikanan

Tujuan ini tersebut diarahkan pada: (1) peningkatan produksi dan produktifitas dalam rangka ketahanan pangan dan investasi, (2) peningkatan pendapatan dan (3) peningkatan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Berikut bagan alur pikir renstra 2025-2029:

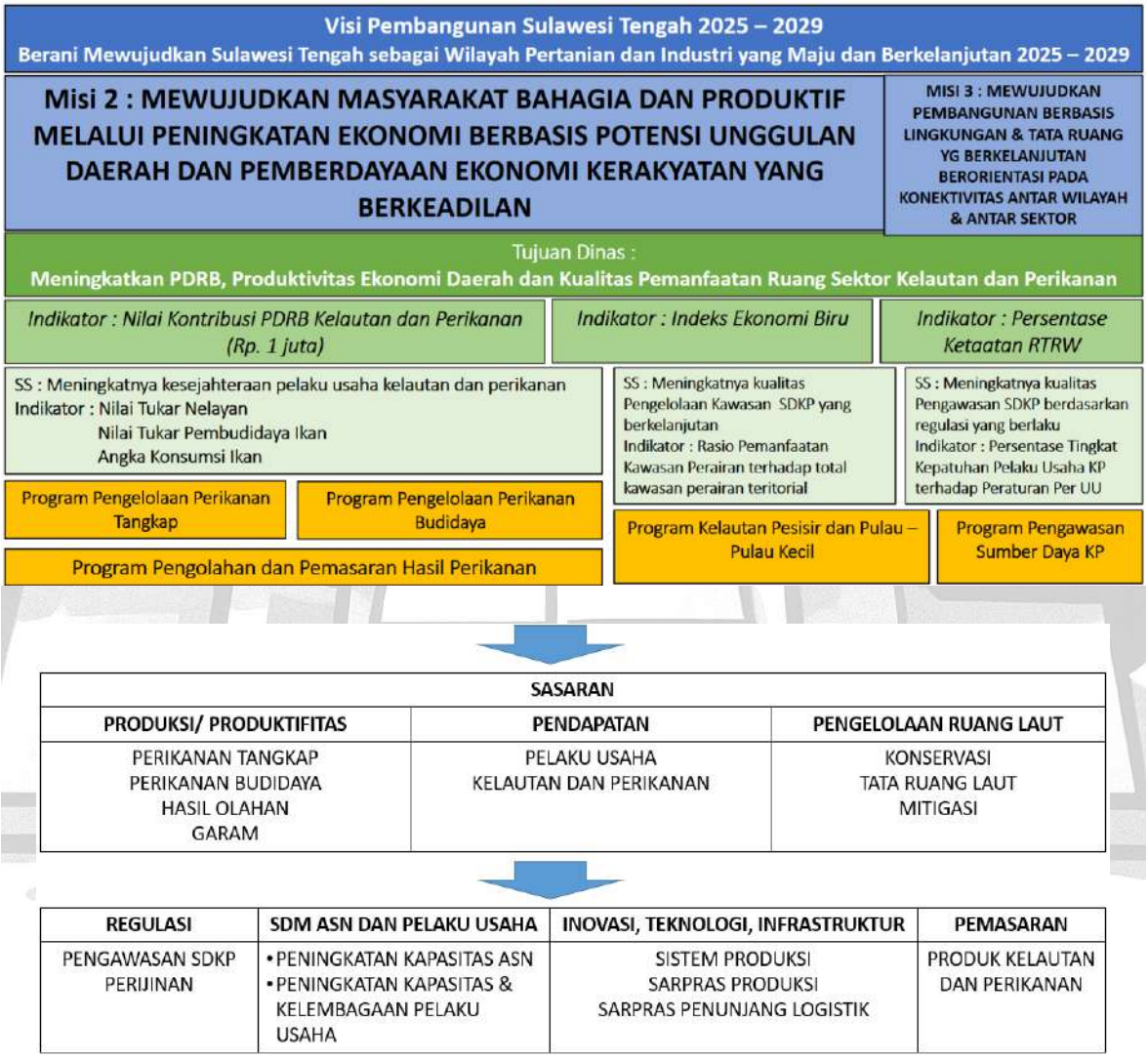

Gambar 3.3
Bagan Alur Pikir Renstra 2025-2029

Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	*Meningkatkan PDRB, Produktivitas Ekonomi Daerah dan kualitas pemanfaatan ruang sektor KP*		*Nilai Kontribusi PDRB Kelautan dan Perikanan (Rp. Milyar)*	11.295,15	11.746,96	12.216,83	12.705,51	13.213,73	13.742,28	
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	101,05	101,86	102,67	103,49	104,32	105,16	
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	101,03	101,54	102,04	102,55	103,07	103,58	
			Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	40,65	43,4	44,5	45,6	46,7	47,6	
Meningkatnya Daya Sainga Daerah dan Produktivitas Ekonomi Daerah			Indeks Ekonomi Biru (%)	49,15	50,5	51,85	53,2	54,55	55,9	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDKP yang Berkelanjutan	Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan territorial	0,1803	0,1804	0,1806	0,1808	0,1810	0,1812	
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang			Peresentase Ketaatan RTRW (%)	77,72	78	79	80	81	82	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan SDKP berdasarkan SDKP yang berlaku	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Peraturan Per UU	82	83	84	85	86	87	

Cascading kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan dalam pohon kinerja sebagai berikut :

Gambar 3.4 Pohon Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

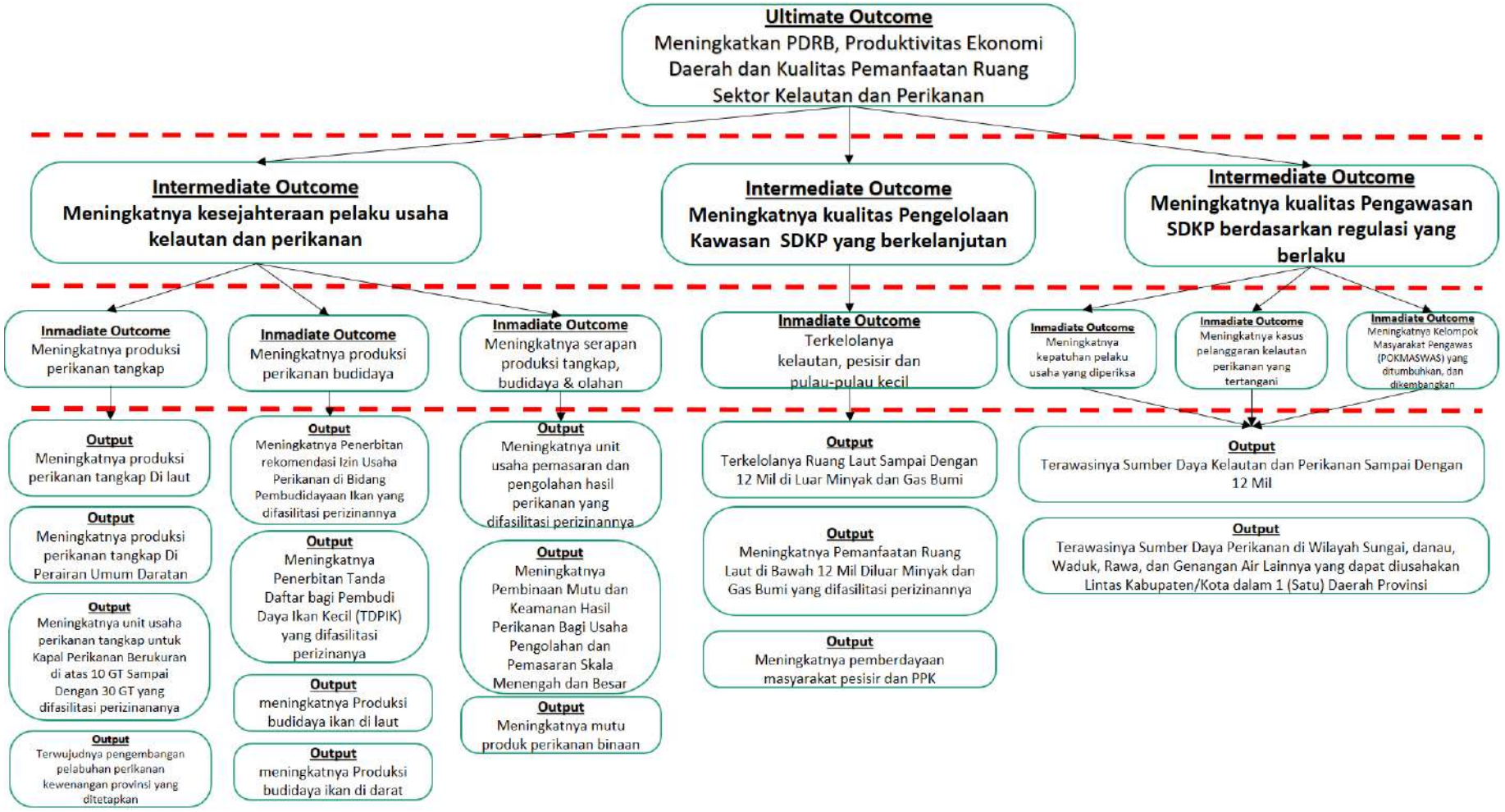

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berani Makmur (Perikanan Tangkap)				
Penguatan Basis Data Kelautan Perikanan, Pemetaan potensi perikanan tangkap dan profil unit, Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha, Uji Coba Program	Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Program	Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Program, Pendampingan dan Monev Program	Pelaksanaan Program, Pendampingan dan Monev Program	Pelaksanaan Program, Pendampingan, Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan sebagai acuan keberlanjutan program selanjutnya
Berani Makmur (Perikanan Budidaya)				
Penguatan data base kelembagaan, Pemetaan potensi perikanan budidaya dan profil unit, uji coba program	Uji coba pelaksanaan program dan penyusunan SOP	Inplementasi program di beberapa kabupaten yang menjadi lokus kegiatan	Penguatan Program dan Pendampingan serta modifikasi kegiatan	Evaluasi terhadap capaian program
Berani Makmur (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan)				
Penguatan Basis Data dan Kelembagaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Penyusunan Profil Unit, Uji Coba Program Inovasi	Pelaksanaan Program, Pemantauan, Pengumpulan Data dan Informasi Capaian Kinerja Program	Pelaksanaan Program, Pemantauan dan Identifikasi Masalah dan Kendala Pelaksanaan Program	Pelaksanaan Program, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Program	Pelaksanaan Program, Evaluasi dampak dan Capaian Pelaksanaan Program Lima Tahun Terakhir untuk Penyempurnaan Program Masa Mendatang
Berani Makmur (Sistem Logistik Ikan Daerah)				
penguatan basic data pengolahan dan pemasaran produk kelautan, pemetaan sistem logistik kelautan	penguatan kelembagaan pelaku usaha, pelaksanaan program	Penguatan kelembagaan Pelaku Usaha, Pelaksanaan Program, Pendampingan dan Monev Program	Pelaksanaan Program, Pendampingan dan Monev Program	Pelaksanaan Program, Pendampingan, Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
perikanan, penguatan kelembagaan pelaku usaha, uji coba program				sebagai acuan keberlanjutan program selanjutnya
Berani Makmur (Pengelolaan Ruang Laut)				
Penguatan Basis Data Ekosistem Laut dan Pesisir, Penguatan Data Spasial dalam rangka pemanfaatan ruang laut, Rehabilitasi Ekosistem Laut dan Pesisir sebagai sarana penguatan keberlanjutan lingkungan	Penataan Kolaboratif, Kelembagaan, dan Regulasi Kawasan Laut dan Pesisir	Implementasi Pemanfaatan Sumberdaya Laut Secara Produktif dan Berkelanjutan	Penguatan Ketahanan Ekosistem Laut dan Pesisir (konservasi) sebagai Pilar Ketahanan Pangan	Pelaksanaan Evaluasi terhadap capaian ketahanan pangan dalam hal peningkatan sumberdaya ekosistem pesisir dalam pemenuhan target Ekonomi Biru
Berani Makmur (Pengawasan SDKP) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir				
Penguatan Basis data sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pantai, Penguatan Kelembagaan Pengawasan dan Penegakan Hukum	Pelaksanaan Pengawasan SDKP Berbasis Teknologi, Kajian Kerugian Ekologis dan Penegakan Hukum serta Pengenaan Denda Administratif	Pengawasan SDKP Berbasis Teknologi, Penegakan Hukum serta Pengenaan Denda Administratif Pelatihan Pengawas SDKP, PPNS, Sosialisasi serta Penguatan Peran Masyarakat Pesisir (Pokmaswas) dan Penegakan Hukum	Pengawasan SDKP Berbasis Teknologi Penegakan Hukum serta Pengenaan Denda Administratif, Revitalisasi Armada Patroli Laut, Monitoring spasial via drone & citra satelit berdasarkan pengawasan berbasis risiko	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan sebagai acuan keberlanjutan program selanjutnya

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah

Misi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Keterangan
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Pelaksanaan promosi di forum nasional dan internasional	Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan/ Inovasi Daerah di tingkat provinsi dan nasional	
	Penguatan sektor unggulan melalui pelatihan hilirisasi, pembangunan infrastruktur produksi, dan branding produk local	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha	
		Peningkatan sarana prasarana infrastruktur dan inovasi peningkatan produktifitas dan nilai tambah produk KP	
	Revitalisasi koperasi sektor riil, digitalisasi koperasi, dan penguatan kontribusi koperasi terhadap ekonomi lokal	Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Masyarakat Pesisir	
	Diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui inovasi ekonomi	Peningkatan kualitas pelayanan pada objek-objek dinas	Unit Pelaksana Teknis Dinas
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan	
	Pengembangan ekonomi hijau dan biru melalui kawasan percontohan, regulasi transisi, dan insentif industri hijau	Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan dalam rangka Implementasi Ekonomi Biru : Optimalisasi sarana prasarana dan infrastruktur pendukung kelautan perikanan, pengembangan inovasi dan teknologi	
	Pembangunan infrastruktur distribusi pangan untuk daerah rawan ketahanan pangan	Pengembangan infrastruktur pendukung Cold Chain System	
	Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT)	Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT)	Lokus Utama Kab. Parigi Moutong, Donggala, Morowali, Banggai Laut, Banggai Kep.
	Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut	Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut	Lokus Utama Kab. Banggai Kep.
	Pengembangan kawasan sentra garam	Pengembangan kawasan sentra garam	Lokus Utama Palu, Buol
	Dukungan Pendampingan dan Pelaksanaan serta Peningkatan SDM Pengelola Koperasi Merah Putih	Pendampingan dan Pengembangan Koperasi Merah Putih sektor Kelautan dan Perikanan	
	Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial	Peningkatan pendapatan pelaku usaha miskin ekstrem sesuai DTSEN	

Misi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Keterangan
Misi 3 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor	Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	
	Perlindungan keanekaragaman hayati melalui edukasi, konservasi lokal, dan jejaring mitra nasional	Sosialisasi, peningkatan kapasitas dan jejaring mitra kelautan dan perikanan	
	Perlindungan dan pemulihan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi;	Pengelolaan, Rehabilitasi dan Pengawasan Ekosistem	
	Perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir serta pengendalian pemanfaatan ruang laut;	Perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir serta pengendalian pemanfaatan ruang laut;	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan: (1) Peningkatan PDRB (2) Peningkatan Produktifitas Ekonomi sub sektor kelautan dan perikanan, serta (3) peningkatan kualitas pemanfaatan ruang subsektor kelautan dan perikanan serta pengawasan sumber daya alam yang mensinergi serta mensinkronisasi arah perencanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan sesuai dengan Kebijakan Pusat, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dimana terdapat beberapa program yang diharapkan dapat menjadi unggulan Sulawesi Tengah di tahun-tahun mendatang dengan pengembangan komoditas kelautan dan perikanan terbagi atas (A) Komoditas Industrialisasi: (1) Rumput Laut : (a) *Euchema cottonii*, (b) *Gracillaria sp*, (2) Tuna, Tongkol, Cakalang, (3) Udang, (4) Ikan Demersal, (5) Sidat, (6) Teripang, (7) Garam dan (B) Komoditas Ketahanan Pangan antara lain (1) Lele, (2) Nila, (3) Mas, (4) Pelagis Kecil.

Program-program yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan diarahkan pula dalam mendukung Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas, yaitu : (1) Memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; (3) Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; (4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan, dimana semua itu bertujuan untuk memperluas perlindungan, mengurangi tekanan/ dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan layanan ekosistemnya dan serapan karbon.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 disusun dalam rangka peningkatan PDRB subsektor kelautan dan perikanan, peningkatan produktivitas ekonomi sektoral melalui penerapan ekonomi biru, peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan

perikanan termasuk mendukung program pemerintah daerah dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Pendapatan rumah tangga miskin, Pengarusutamaan Gender, Percepatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S), Petani Milenial serta Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu).

a. Ekonomi Biru

Ekonomi Biru adalah program strategis yang menjadi bagian dari *Game Changer* untuk mencapai visi Indonesia 2045. Ekonomi biru termasuk dalam strategi kedua yang berfokus pada produktivitas di sektor ekonomi. Produktivitas menyiratkan transformasi ekonomi yang akan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia yang kuat dengan menerapkan manajemen sumber daya laut yang baik untuk mencapai sektor maritim yang berkelanjutan. Ekonomi biru diukur dengan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) yang dibangun di atas 3 pilar yang menjadi komponen utama dalam pembangunan berkelanjutan, 11 sub pilar dan 44 indikator. Ketiga pilar tersebut adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan beberapa subsektor dan indikator yang mewakili masing-masing pilar. Selain 3 pilar tersebut, terdapat tambahan dua indikator penting lainnya, yaitu Teknologi dan Tata Kelola yang berfungsi sebagai pemungkin (*enabler*) yang akan mendukung akselerasi sektor-sektor ekonomi biru. Berikut gambaran pilar, sub pilar dan indikator ekonomi biru.

PILAR EKONOMI, SUB-PILLAR DAN INDIKATORNYA

PILAR	SUB PILAR	INDIKATOR
EKONOMI	PERIKANAN TANGKAP DAN AKUAKULTUR;	1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB (%) 2. Produksi di sektor perikanan (volume, ton) 3. Produksi perikanan budidaya laut (volume, ton) 4. Produksi perikanan budidaya tambak (volume, ton) 5. Produksi rumput laut (volume, ton)
	PERDAGANGAN, TRANSPORTASI DAN LOGISTIK;	1. Angkutan laut (volume ton) 2. Angkutan penumpang maritim (orang) 3. Angkutan penumpang maritim di 25 pelabuhan strategis (orang) 4. Ekspor ikan (volume, ton) 5. Pangsa ekspor ikan terhadap total ekspor (%) 6. Ekspor ikan dan akuakultur (volume, ton)
	MANUFAKTUR BERBASIS KELAUTAN, DAN	1. Ekspor ikan olahan (volume, ton) 2. Produksi garam (volume, ton) 3. Jumlah kapal penangkap ikan (unit)
	PARIWISATA BERBASIS KELAUTAN.	1. Jumlah tempat wisata bahari (jumlah tempat); 2. Jumlah perusahaan dalam kegiatan wisata air (jumlah perusahaan)

PILAR LINGKUNGAN, SUB-PILLAR DAN INDIKATORNYA

PILAR	SUB PILAR	INDIKATOR
LINGKUNGAN	KUALITAS SUMBER DAYA DAN KONSERVASI LAUT	1. Kualitas terumbu karang yang baik (%) 2. Kualitas lamun yang baik (%) 3. Kualitas hutan bakau yang baik (%) 4. Jumlah desa pesisir dengan pembuangan sampah (jumlah desa) 5. Jumlah desa pesisir dengan tempat buang air besar dan saluran pembuangan air limbah (jumlah desa) 6. Rehabilitasi hutan bakau, hutan, rawa dan gambut (Ha) 7. Pembuangan sampah di laut (gr/m2) 8. Pembuangan limbah di darat (ton) 9. Total kawasan lindung laut (Ha)
	ENERGI TERBARUKAN	1. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (MW) 2. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga surya (GWh) 3. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga air (MW) 4. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air (GWh)

PILAR SOSIAL, SUB-PILLAR DAN INDIKATORNYA

PILAR	SUB PILAR	INDIKATOR
SOSIAL	KESEJAHTERAAN	1. Persentase penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang menerima subsidi dari Program Keluarga Harapan (PKH) (%); 2. Jumlah pekerja perempuan di sektor perikanan (orang) 3. Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan (orang)
	KESEHATAN	1. Rata-rata konsumsi harian ikan per kapita (kkal) 2. Rata-rata konsumsi protein harian per kapita (kkal) 3. Persentase penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang tercakup dalam asuransi kesehatan (%) 4. Persentase penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup di bawah garis kemiskinan (%)
	PENDIDIKAN DAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN	1. Jumlah sekolah kejuruan untuk kemaritiman (sekolah) 2. Jumlah lulusan dari sekolah perikanan (orang) 3. Jumlah peserta pelatihan perikanan (orang) 4. Persentase penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang bersekolah di sekolah menengah atas (%) 5. Persentase penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang lulus SMA (%) 6. Persentase penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang menerima subsidi Program Indonesia Pintar (PIP) (%)

Gambar 4.1
Pilar, Sub Pilar dan Indikator Ekonomi Biru

Melalui program Ekonomi Biru, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi ya.ng berkelanjutan di tingkat regional dan nasional, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Secara umum, IBEI memiliki tujuan sebagai berikut: 1. IBEI berfungsi sebagai instrumen untuk memantau kinerja sektor-sektor ekonomi biru di Sulawesi Tengah dan mengetahu peluang dan potensi mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia 2045. 2. IBEI dibangun berdasarkan dasbor indikator ekonomi makro terpilih daerah, yang dapat menyoroti kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan terkait dengan sektor-sektor ekonomi biru. Kebijakan khusus daerah kemudian dapat ditetapkan untuk memenuhi target tertentu untuk setiap indikator. 3.

IBEI mendorong koordinasi yang lebih baik di antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor-sektor ekonomi biru, seperti pariwisata, perikanan, dan transportasi. 4. IBEI juga dapat memberikan masukan mengenai kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang perlu difokuskan untuk mengatasi masalah ketimpangan atau target kebijakan daerah lainnya.

Adapun pola *crosscutting* pelaksanaan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah ditampilkan pada Gambar 4.2 berikut:

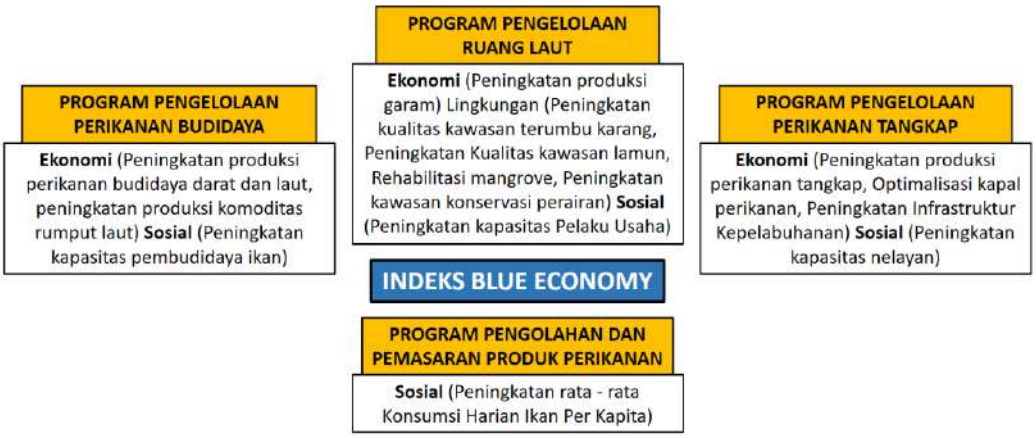

Gambar 4.2
Crosscutting Indeks Ekonomi Biru Dinas Kelautan dan Perikanan

b. Penanggulangan Kemiskinan

Program Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Tengah dilakukan secara terintegrasi dengan basis data P3KE tervalidasi dan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Strategi Penanggulangan Kemiskinan pada sub sektor kelautan dan perikanan yaitu melalui peningkatan pendapatan, yang difokuskan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui penyediaan bantuan sarana dan prasarana di sub sektor perikanan, termasuk kemudahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan serta bantuan peralatan usaha. Sementara itu, peningkatan kompetensi masyarakat diarahkan pada penyediaan informasi pasar kerja, pelatihan kerja, program padat karya, serta bantuan permodalan untuk mendorong wirausaha. Akses terhadap kesempatan kerja dan usaha juga ditingkatkan untuk memperluas jangkauan lapangan penghidupan masyarakat miskin.

Berikut *cross cutting* program penanggulangan kemiskinan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 4.3
cross cutting Program Penanggulangan Kemiskinan

c. Program Percepatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S)

Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Stranas P3S) 2025–2029 disusun sebagai pedoman utama pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Strategi ini bertujuan menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,4% pada 2029 dan 5% pada 2045 melalui penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta perbaikan sistem tata kelola, layanan, dan perilaku masyarakat.

Stranas P3S dibangun di atas enam pilar strategi: komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi program dan kemitraan, ketahanan pangan dan gizi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta pemantauan dan evaluasi dimana Dinas Kelautan dan Perikanan masuk dalam strategi ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi diarahkan untuk menjamin cakupan layanan gizi.

Pelaksanaan program ini melekat pada Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan dengan kelompok sasaran intervensi terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu nifas; anak usia 0 – 23 bulan; anak usia 24 – 59 bulan; remaja putri dan calon pengantin; keluarga dan masyarakat.

d. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki, perempuan dan masyarakat marginal dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan. Secara teknis, PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif dan analisis gender ke dalam proses pembangunan di segala bidang. Salah satuinstrumen analisis yang dapat digunakan antara lain 'Alur Kerja Analisis Gender' atau *Gender Analysis Pathway* (GAP). Hasil analisis gender ini kemudian digunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

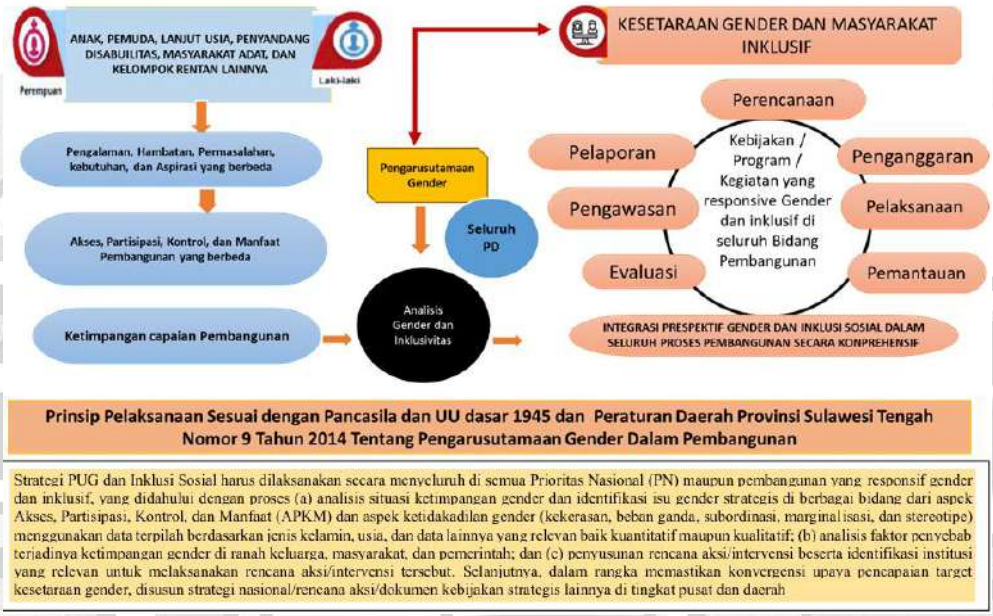

Sumber : RPJMD Sulteng 2025-2030

Gambar 4.4
Crosscutting Pengarustamaan Gender

e. Petani Milenial (Petmil)

Tujuan umum dari program petani milenial Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya menumbuhkembangkan kewirausahaan muda pertanian di Sulawesi Tengah, mengubah wajah pertanian menjadi baru, agar generasi milenial tertarik menjadi petani dengan pemanfaatan teknologi digital, menciptakan pertanian maju, mandiri dan modern, mengurangi problem ketersediaan tenaga kerja pertanian di Sulawesi Tengah. Adapun tujuan khusus yaitu :

1. Mengakselerasi pelaksanaan Program Petani Milenial di Sulawesi Tengah;
2. Menumbuhkan minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
3. Meningkatkan kapasitas generasi muda dalam berusaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
4. Menumbuhkembangkan wirausaha muda pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Intervensi Program Petani Millenial di Sulawesi Tengah antara lain dapat berupa : (1) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis pelaku usaha; (2) Fasilitasi sarana dukungan kegiatan budidaya, pengolahan dan pemasaran; (3) Pembentukan jaringan kerjasama dalam kaitan pemasaran produk maupun pengembangan usaha serta (4) Penciptaan produk inovasi untuk meningkatkan nilai jual produk.

Gambar 4.5
Crosscutting Program Petani Millenial Kelautan & Perikanan

4.1 Uraian Program

Dalam mendukung 14 Program Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Asta Cita, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 9 (sembilan) Program Prioritas Daerah sebagai berikut : (1) Berani Cerdas; (2) Berani Sehat; (3) Berani Sejahtera; (4) Berani Lancar; (5) Berani Menyala; (6) Berani Makmur; (7) Berani Berkah; (8) Berani Harmoni; dan (9) Berani Berintegritas. Guna memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional, 9 (sembilan) Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan program-program sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

900.1.15.5-3406 Tahun 2023 dan turunannya dimana Dinas Kelautan dan Perikanan difokuskan pada Program Berani Makmur.

No	Program Utama	Program Sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406	Keterangan
1	Berani tangkap banyak melalui restrukturisasi alat tangkap alat bantu penangkapan bagi nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Berbasis pelabuhan perikanan kewenangan provinsi
2	Peningkatan Infrastruktur Kepelabuhanan dalam rangka mendukung program nasional hilirisasi TCT	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PP Mato, PP Donggala, PP Paranggi, PP Pagimana, PP Lafeu, PP Ogotua
3	Peningkatan pendapatan pelaku usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pada daerah desil I sesuai data yang berlaku dan tervalidasi
	Berani membangun lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	4 WPP kewenangan Sulawesi Tengah serta pada kawasan konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan
	Pengembangan rumput laut dalam rangka mendukung program nasional hilirisasi rumput laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Banggai Kepulauan
	Program Petani Millenial	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	
	Peningkatan sarana prasarana kelautan dan perikanan lainnya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	Perikanan tangkap lokus utama pada pelabuhan perikanan kewenangan provinsi Perikanan budidaya – budidaya air tawar lokus utama kota palu, kab.sigi, kab. Poso, Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara – budidaya air payau dan laut lokus utama Kab. Parigi Moutong, Kab. Donggala Kab. Tojo Una-una, Kab. Banggai, Kab. Toli-toli, Kab. Buol

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-15-5-3406-2024 terdapat 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dimana pengembangan perikanan budidaya dilakukan melalui (1) pengembangan Rumput Laut dengan komoditas unggulan antara lain: *Eucheuma cottonii, E. Spinosum* dan *Gracilaria verrucosa*, Udang, Bandeng, Nila, Mas, Lele melalui karamba jaring tancap (KJT) dan karamba jaring apung (KJA), kolam ekstensif dan kolam intensif menggunakan inovasi teknologi budidaya; (2) peningkatan kapasitas dan kelembagaan pembudidaya; (3) pengembangan sarana prasarana perbenihan dan pendukungnya pada unit pelaksana teknis dinas dan unit perbenihan rakyat; (4) pendampingan kampung perikanan budidaya merah putih; (5) pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan; (6) Pendampingan sertifikasi proses budidaya ikan yang baik dan (7) Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan perikanan budidaya.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan melalui revitalisasi perikanan tangkap yang dilakukan melalui upaya: (1) Pemulihan stok sumber daya ikan; (2) Penguatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan dengan sarana pendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN); (3) Restrukturisasi armada kapal perikanan; (4) Pengembangan kampung nelayan merah putih; dan (5) Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan dengan fokus pada penataan izin usaha penangkapan ikan melalui penerapan sistem berbasis *online system.*

Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dilakukan melalui: (1) Pengembangan produk dan promosi hasil perikanan; (2) Peningkatan pendapatan pengolah dan pemasaran hasil perikanan; (3) Peningkatan infrastruktur sistem logistik

ikan nasional (SLIN); (4) Peningkatan Konsumsi Ikan; dan (5) Peningkatan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan.

Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan melalui beberapa upaya antara lain: (1) Penataan regulasi dan perijinan kelautan perikanan; (2) Pengelolaan dan pendayagunaan Kawasan Konservasi dan Pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dan ekowisata; (3) Pemetaan dan pengelolaan mitigasi dan adaptasi bencana perubahan dan pencemaran wilayah Kelautan, pesisir dan Pulau-pulau kecil; (4) Peningkatan sistem pengawasan terintegrasi berupa pengawasan kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP; (5) Pemetaan dan rencana strategis penanggulangan daerah rawan *illegal fishing*; dan (6) Sosialisasi peraturan perundang undangan bidang perikanan.

Program ini diselaraskan dengan Program Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yaitu:

a) Memperluas kawasan konservasi laut, Program Prioritas:
    1) Penetapan perlindungan kawasan konservasi melalui pendaftaran IMO (*International Maritime Organization*)
    2) Pembangunan modelling pengelolaan kawasan konservasi terpadu untuk *carbon storage*
    3) Penyusunan *Ocean Accounting*
    4) Pembangunan sistem pengawasan berbasis satelit
    5) Pembentukan model pendanaan *coral bond*
    6) Pengembangan perdagangan nilai *carbon*
b) Penangkapan ikan terukut berbasis kuota dan zona, Program Prioritas:
    1) Pengembangan pelabuhan ramah lingkungan yang berstandar internasional
    2) Restrukturisasi dan modernisasi armada kapal penangkapan ikan berbasis kuota
    3) Hilirisasi dan industrialisasi komoditas penting perikanan tangkap
    4) Pembangunan kampung nelayan merah putih
    5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
    6) Peningkatan pengawasan berbasis IT

c) Peningkatan produksi budidaya berkelanjutan, Program Prioritas:
   1) Modelling dan revitalisasi tambak budidaya
   2) Hilirisasi dan industrialisasi rumput laut, udang, tilapia dan kepiting
   3) Sertifikasi produk perikanan budidaya
   4) Pembangunan kampung perikanan budidaya merah putih
   5) Pengembangan sumberdaya manusia
   6) Pemanfaatan IT untuk mendukung aktivitas budidaya
d) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Program Prioritas :
   1) Modelling tambak garam menuju swasembada garam
   2) Pengembangan *Ocean Monitoring System*
   3) Penguatan ekonomi masyarakat pesisir berkelanjutan
   4) Penguatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pesisir
   5) Pembangunan neraca sumber daya dan sistem *One Map Policy*
   6) Pengembangan wisata berbasis ekologi
   7) Pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan
e) Pembersihan sampah plastik di laut, Program Prioritas:
   1) Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut
   2) Pembangunan laboratorium pengujian mikroplastik hasil perikanan
   3) Pengendalian sampah dan limbah di unit produksi perikanan
   4) Desa Pesisir Bersih

4.2 Uraian Kegiatan dan Sub kegiatan

Terdapat 24 kegiatan yang di ampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 16 kegiatan teknis dan 8 (delapan) kegiatan rutin, sebagai berikut:

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
   2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
   3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT

4) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2) Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
4) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

d) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil

e) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

f) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Uraian sub kegiatan, indikator, target, pagu indikatif serta target-target lainnya dapat dilihat pada tabel 4.2 sampai dengan 4.6.

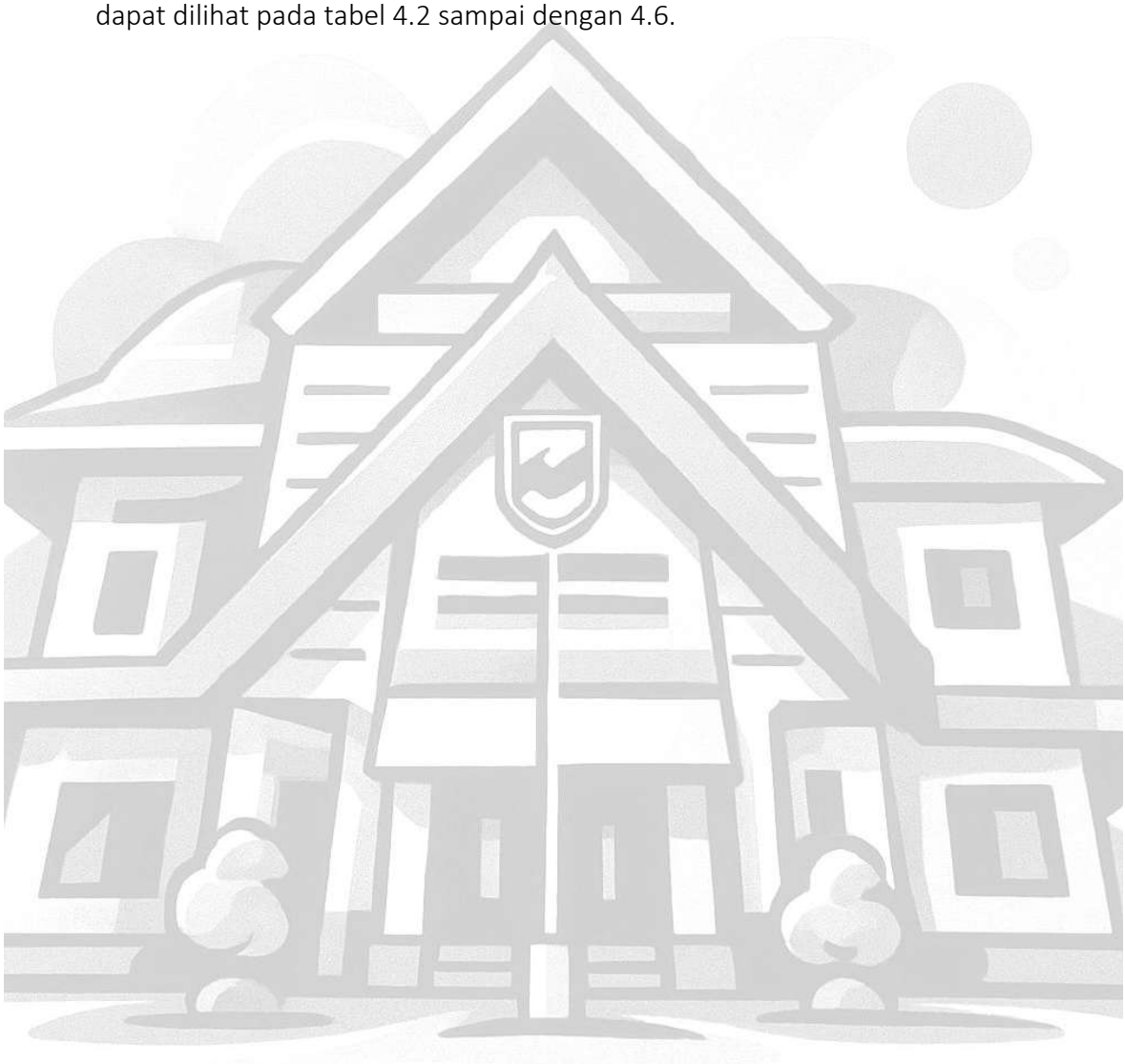

BAB V
P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Visi Misi Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termaktub dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Dokumen ini dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran selama kurun waktu Tahun 2025-2029, sesuai dengan misi yang diemban oleh dinas yang merupakan salah satu pedoman bagi pelaksanaan kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Renstra dan juga bila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain: 1) Memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; 2) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh dinas, baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 3) Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut: (1) Sekretariat, Bidang dan UPT agar mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya; (2) Diharapkan seluruh aparatur pada Sekretariat, Bidang dan UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergi, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai; (3) Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun; (4) Guna menjaga konsistensi dan keselarasan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra ini; (5) Dalam rangka

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; (6) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun sesuai dengan Isu Strategis daerah dan perkembangan dinamika politik, sosial, budaya dan isu-isu permasalahan terkini, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renstra ini juga merupakan Implementasi penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, baik jajaran struktural, fungsional maupun pelaksana dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dinas/badan dan sasaran pembangunan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dan berkualitas sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	**Meningkatkan PDRB, Produktivitas Ekonomi Daerah dan kualitas pemanfaatan ruang sektor KP**				**Nilai Kontribusi PDRB Kelautan dan Perikanan (Rp. 1 juta)**		
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan			**Nilai Tukar Nelayan** **Nilai Tukar Pembudidaya Ikan** **Angka Konsumsi Ikan**		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		**Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Bidang Perikanan Tangkap**
			Meningkatnya PAD		**PAD (Rp1.000)**		**UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-6**
			Terlaksananya pelayanan di Pelabuhan Perikanan		**Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)**		**UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 7**
				Meningkatnya produksi perikanan tangkap Di Laut	Produksi Perikanan Tangkap Dilaut (ton)	3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Bidang Perikanan Tangkap
						3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Bidang Perikanan Tangkap
						3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap
						3.25.03.1.01.0007 Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Bidang Perikanan Tangkap
						3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap
				Meningkatnya produksi perikanan tangkap Di Perairan darat	Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan darat (ton)	3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Perikanan Tangkap
						3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Bidang Perikanan Tangkap
						3.25.03.1.02.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap
				Meningkatnya unit usaha perikanan tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi perizinananya	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Bidang Perikanan Tangkap
						3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Bidang Perikanan Tangkap
				Terwujudnya pengembangan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi yang ditetapkan	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan (%)	3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Bidang Perikanan Tangkap
				Meningkatnya produksi ikan	Produksi ikan yang didaratkan (kg)		UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-7
						3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap
						3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-7
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Bidang Perikanan Budidaya**
			Meningkatnya PAD		**PAD (Rp. 1000)**		**UPTD Perbenihan**
				Meningkatnya Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang difasilitasi perizinannya	Persentase Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang difasilitasi (%)	3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Perikanan Budidaya
						3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Bidang Perikanan Budidaya
						3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Bidang Perikanan Budidaya
				Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang difasilitasi perizinanya	Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang difasilitasi	3.25.04.1.04 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Perikanan Budidaya

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3.25.04.1.04.0002 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Perikanan Budidaya
				meningkatnya Produksi budidaya ikan di laut	produksi budidaya ikan di laut (ton)	3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Bidang Perikanan Budidaya
						3.25.04.1.05.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Perikanan Budidaya
						3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Bidang Perikanan Budidaya
						3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Bidang Perikanan Budidaya
						3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Perikanan Budidaya
						3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perikanan Budidaya
						3.25.04.1.05.0014 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Bidang Perikanan Budidaya
				meningkatnya Produksi budidaya ikan di darat	produksi budidaya ikan di darat (ton)	3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Bidang Perikanan Budidaya
				Meningkatnya produksi benih perikanan air payau dan tawar	Produksi benih (juta ekor)		UPTD Perbenihan
						3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bidang/UPTD Perbenihan
						3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikandi Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perikanan Budidaya
			Meningkatnya serapan produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan		**Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi (ton)**	**3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Bidang P2HP**
			Meningkatnya penerapan standar mutu perikanan		**Persentase pelaku usaha KP yang menerapkan Standar Mutu Perikanan (%)**		**UPTD PMHP**
				Meningkatnya unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi perizinannya	Persentase unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi perizinannya	3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang P2HP
						3.25.06.1.01.0004 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang P2HP
				Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah produk olahan kelautan dan perikanan tersertifikasi (jumlah)	3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Bidang P2HP
				Meningkatnya penerapan Inovasi	Inovasi yang diterapkan (inovasi)		UPT PMHP
						3.25.06.1.02.0003 PelaksanaanPembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, danDaya Saing serta PemberdayaanUsaha dalam rangkaMenghasilkanProdukyang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Bidang P2HP/UPT PMHP
						3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	UPT PMHP
				Meningkatnya mutu produk perikanan binaan	Rasio bahan baku industri pengolahan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang P2HP
						3.25.06.1.03.0001 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang P2HP

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang P2HP

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Daya Sainga Daerah dan Produktivitas Ekonomi Daerah					**Indeks Ekonomi Biru (%)**		
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan SDKP yg berkelanjutan			***Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan teritorial***		
			Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil		**Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan (%)**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Bidang PRL**
					Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi (DOBOTO, TOMINI, MOROWALI, BANGGAI DALAKA)		**UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-7**
				Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola (Ha)	3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Bidang PRL
				meningkatnya kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)		UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-7
						3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Bidang/UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-7
						3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang PRL
						3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang PRL
						3.25.02.1.01.0005 Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Bidang PRL
				Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang difasilitasi perizinannya	Persentase Arahan Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang Difasilitasi (%)	3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Bidang PRL
						3.25.02.1.02.0006 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Bidang PRL
						3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikana	Bidang PRL
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan PPK	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	3.25.02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Bidang PRL
						3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang PRL
						3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang PRL
						3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang PRL
						3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Bidang PRL
						3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Bidang PRL
						3.25.02.1.03.0007 Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Bidang PRL
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang					**Peresentase Ketaatan RTRW (%)**		
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan SDKP yg berkelanjutan			***Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Peraturan Per UU***		
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang diperiksa		**Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya (%)**	**3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Bidang PSDKP**
			Meningkatnya kasus pelanggaran kelautan perikanan yang tertangani		**Persentase Tertanganinya pelanggaran kelautan perikanan (%)**		

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		**Persentase POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (%)**	PERIKANAN	
				Terawasinya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi (pelaku usaha)	3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Bidang PSDKP
						3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Bidang PSDKP
						3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12Mil sesuai kewenangan provinsi	Bidang PSDKP
						3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Bidang PSDKP
						3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan kewenangan provinsi	Bidang PSDKP
						3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Bidang PSDKP
						3.25.05.1.01.0018 Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Bidang PSDKP
				Terawasinya Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi (pelaku usaha)	3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang PSDKP
						3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Bidang PSDKP
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan		Indeks Reformasi Birokrasi PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fungsional Perencana
						5.1.01.101.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	5.1.01.101.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	5.1.01.101.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						5.1.01.101.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemerikaan (TLHP)	Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KASUBAG KEUANGAN DAN ASET
						5.1.01.102.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						5.1.01.102.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						5.1.01.102.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						5.1.01.102.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						5.1.01.102.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						5.1.01.102.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KASUBAG KEUANGAN DAN ASET
						5.1.01.103.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						5.1.01.103.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						5.1.01.103.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						5.1.01.105.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						5.1.01.105.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						5.1.01.105.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	5.1.01.105.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	5.1.01.105.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	'KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	5.1.01.106.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						5.1.01.106.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						5.1.01.106.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	5.1.01.106.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	5.1.01.106.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						5.1.01.107.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	5.1.01.108.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						5.1.01.108.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						5.1.01.108.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						5.1.01.108.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						5.1.01.109.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						5.1.01.109.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						5.1.01.109.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						5.1.01.109.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
BIDANG PERIKANAN TANGKAP						**3.143.905.600**		**8.165.172.981**		**9.057.948.929**		**10.435.333.607**		**11.518.018.933**	
3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**Meningkatnya produksi perikanan tangkap**		**291.013,15**	**307.261,94**	**3.143.905.600**	**285.748,30**	**8.165.172.981**	**290.034,53**	**9.057.948.929**	**294.385,04**	**10.435.333.607**	**298.800,82**	**11.518.018.933**	**Bidang Perikanan Tangkap**
3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Meningkatnya produksi perikanan tangkap Di Laut			304147,1	900.000.000	282.586,74	3.467.586.490	286.825,54	3.857.948.929	291.127,92	4.335.333.607	295.494,84	4.818.018.933	Bidang Perikanan Tangkap
3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (dokumen)		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1	700.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	Bidang Perikanan Tangkap
3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1	100.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	Bidang Perikanan Tangkap
3.25.03.1.01.0007 Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		-	-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	Bidang Perikanan Tangkap
3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha PerikananTangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		300	100.000.000	325	2.417.586.490	350	2.557.948.929	375	2.785.333.607	400	3.018.018.933	Bidang Perikanan Tangkap
3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan darat (ton)	Meningkatnya produksi perikanan tangkap Di Perairan darat			3.114,84	100.000.000	3.161,56	200.000.000	3.208,99	300.000.000	3.257,12	400.000.000	3.305,98	500.000.000	Bidang Perikanan Tangkap
3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah laporan data statistik perikanan tangkap Darat (laporan)		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat		1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	Bidang Perikanan Tangkap
3.25.03.1.02.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha PerikananTangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat		1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	Bidang Perikanan Tangkap
3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)	Meningkatnya unit usaha perikanan tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi perizinananya			100	800.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.200.000.000	Bidang Perikanan Tangkap
3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikanuntuk kapal ukuran diatas GT-30GTdan beroperasi sampai dengan 12 mil		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil		100	800.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.200.000.000	Bidang Perikanan Tangkap
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan (%)		Terwujudnya pengembangan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi yang ditetapkan		25	1.343.905.000	25	3.597.586.491	25	3.900.000.000	25	4.600.000.000	25	5.000.000.000	Bidang Perikanan Tangkap
3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		2	1.343.905.000	2	3.597.586.491	2	3.900.000.000	2	4.600.000.000	2	5.000.000.000	Bidang Perikanan Tangkap

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP						**5.000.000.000**		**5.500.000.000**		**6.100.000.000**		**6.700.000.000**		**7.600.000.000**	
3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**		**803.370,46**	**883.870,21**	2.700.000.000	**892.708,91**	3.000.000.000	**901.636,00**	3.350.000.000	**910.652,36**	3.700.000.000	**919.758,88**	4.100.000.000	**Bidang Perikanan Budidaya**
3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang difasilitasi (%)	Meningkatnya Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang difasilitasi perizinannya					100		100		100		100		Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan				3	100.000.000	3	120.000.000	3	150.000.000	3	190.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan diBidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko (Dokumen)		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				4	100.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.04 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang difasilitasi	Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang difasilitasi perizinanya					100	100.000.000	100	110.000.000	100	150.000.000	100	180.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.04.0002 Penerbitan Tanda Daftar bagi PembudiDayaIkanKecil (TDPIK)di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)		Diterbitkannya ekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				5	100.000.000	7	120.000.000	9	150.000.000	11	180.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	produksi budidaya ikan di laut (ton)	Meningkatnya Produksi budidaya ikan di laut			707.096,17		714.167,13		721.308,80		728.521,89		735.807,10		Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.05.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		3	400.000.000	5	350.000.000	7	500.000.000	9	500.000.000	11	500.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)		Tersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		5	400.000.000	8	350.000.000	11	500.000.000	14	500.000.000	17	500.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi		1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan LingkunganBudidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	Bidang Perikanan Budidaya

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
3.25.04.1.05.0014 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan		Tersedianya Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	produksi budidaya ikan di darat (ton)	Meningkatnya Produksi budidaya ikan di darat			176.774,04		178.541,78		180.327,20		182.130,47		183.951,78		Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana PembudidayaanIkan di Air Payau danAir Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		5	400.000.000	8	400.000.000	11	400.000.000	14	400.000.000	17	400.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikandi Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi (ton)**	**Meningkatnya serapan produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan**		**249.379,70**	**257.640,73**	**2.300.000.000**	**265.901,75**	**2.500.000.000**	**274.162,78**	**2.750.000.000**	**282.423,80**	**3.000.000.000**	**290.684,83**	**3.500.000.000**	**Bidang P2HP**
3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi perizinannya (%)	Meningkatnya unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi perizinannya		100	100		100		100		100		100		Bidang P2HP
3.25.06.1.01.0004 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen)		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	410.000.000	Bidang P2HP
3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Produksi Perikanan Olahan (kg)	Meningkatnya jumlah produksi ikan		6844871	6883551		7052002		7223102		7561224		7865220		Bidang P2HP
3.25.06.1.02.0003 PelaksanaanPembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, danDaya Saing serta PemberdayaanUsaha dalam rangkaMenghasilkanProdukyang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya saing (kegiatan)		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	5	6	990.000.000	7	590.000.000	8	1.500.000.000	9	1.100.000.000	10	1.500.000.000	Bidang P2HP
3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio bahan baku industri pengolahan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya mutu produk perikanan binaan		0,5	0,65		0,7		0,75		0,8		0,85		Bidang P2HP
3.25.06.1.03.0001 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)		Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	1	275.000.000	1	100.000.000	1	275.000.000	1	190.000.000	1	390.000.000	Bidang P2HP

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi (unit usaha)		Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10	20	825.000.000	25	1.600.000.000	30	765.000.000	35	1.500.000.000	40	1.200.000.000	Bidang P2HP

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
Bidang Pengelolaan Ruang Laut						**2.550.000.000**		**2.900.000.000**		**3.100.000.000**		**3.351.645.539**		**3.700.000.000**	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan (%)**	**Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil**			**17,9882**	**2.550.000.000**	**17,9898**	**2.900.000.000**	**17,9914**	**3.100.000.000**	**17,993**	**3.351.645.539**	**17,9946**	**3.700.000.000**	**Bidang PRL**
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola (Ha)	Terkelolanya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		620132,481	739.291,71		806207,30		873122,89		977364,39	-	1087660,30		Bidang PRL
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	616.902	736.061	650.000.000	802.975	780.000.000	869.890	858.000.000	974.130	943.800.000	1.084.425	1.038.180.000	Bidang/UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-7
3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang direhabilitasi (Ha)		Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.230,20	3.231,20	850.000.000	3.232,20	935.000.000	3.233,20	1.122.000.000	3.234,20	1.234.200.000	3.235,20	1.357.620.000	Bidang PRL
3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (orang)		Terbinanya Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		50	100.000.000	50	110.000.000	50	121.000.000	50	133.100.000	50	159.720.000	Bidang PRL
3.25.02.1.01.0005 Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP3K	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/ Dokumen Final RZWP3K		Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1	150.000.000	1	155.000.000					Bidang PRL
3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Arahan Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang Difasilitasi (%)	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang difasilitasi perizinannya			100	135.000.000	100	145.000.000	100	145.000.000	100	160.000.000	100	180.000.000	Bidang PRL
3.25.02.1.02.0006 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan		Tercatat/terdokumentasikan nya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha		1	50.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	Bidang PRL
3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikana	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan		Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan		1	100.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	115.000.000	1	135.000.000	Bidang PRL
3.25.02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan PPK			10	225.000.000	10	200.000.000	10	154.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	Bidang PRL
3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (orang)		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil		100	100.000.000	100	100.000.000	100	50.000.000	100	80.545.539	100	100.000.000	Bidang PRL
3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1	75.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	84.480.000	Bidang PRL
3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil				20	75.000.000	20	50.000.000					Bidang PRL

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		1	65.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Bidang PRL
3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia		Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman		1	100.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	Bidang PRL
3.25.02.1.03.0007 Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia		Tersedianya Prasarana Usaha Pergaraman		1	100.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Bidang PRL
Bidang PSKPD						**2.800.000.000**		**3.000.000.000**		**3.250.000.000**		**3.700.000.000**		**4.000.000.000**	
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Persentase pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya (%)**	**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang diperiksa**		**126**	**55**	**2.800.000.000**	**60**	**3.000.000.000**	**65**	**3.250.000.000**	**70**	**3.700.000.000**	**75**	**4.000.000.000**	**Bidang PSDKP**
	Persentase Tertanganinya pelanggaran KP (%)	**Meningkatnya kasus pelanggaran KP yang tertangani**		**110**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Bidang PSDKP**
	Persentase POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (%)	**Meningkatnya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan**		**100**	**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**Bidang PSDKP**
3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi (pelaku usaha)	Terawasinya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		343	230	2.500.000.000	230	2.680.000.000	280	2.900.000.000	280	3.304.000.000	330	3.572.000.000	Bidang PSDKP
3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani (perkara)		Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	30	20	250.000.000	20	265.000.000	20	290.000.000	20	328.000.000	20	358.000.000	Bidang PSDKP
3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	28	15	300.000.000	15	320.000.000	15	350.000.000	15	400.000.000	15	428.000.000	Bidang PSDKP
3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	300	200	900.000.000	200	975.000.000	250	1.030.000.000	250	1.190.000.000	300	1.285.000.000	Bidang PSDKP
3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15	15	300.000.000	15	320.000.000	15	350.000.000	15	396.000.000	15	428.000.000	Bidang PSDKP
3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (kelompok masyarakat)		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	29	20	500.000.000	20	530.000.000	20	590.000.000	20	660.000.000	20	715.000.000	Bidang PSDKP

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
3.25.05.1.01.0018 Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan (forum kordinasi)		Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1	1	250.000.000	1	270.000.000	1	290.000.000	1	330.000.000	1	358.000.000	Bidang PSDKP
3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi (pelaku	Terawasinya Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		40	30	300.000.000	30	320.000.000	30	350.000.000	30	396.000.000	30	428.000.000	Bidang PSDKP
3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	40	30	300.000.000	30	320.000.000	30	350.000.000	30	396.000.000	30	428.000.000	Bidang PSDKP
SEKRETARIAT						**28.024.756.252**		**29.476.163.393**		**30.655.209.929**		**31.881.418.326**		**33.156.675.059**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Reformasi Birokrasi PD**	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan**			**68**	**28.024.756.252**	**68,5**	**29.476.163.393**	**69**	**30.655.209.929**	**69,5**	**31.881.418.326**	**70**	**33.156.675.059**	
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja			83,5		84		84,5		85		85,5		Fungsional Perencana
	Persentase capaian IKU Perangkat Daerah				100		100		100		100		100		
	Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah				75		75		75		75		75		
5.1.01.101.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11	200.000.000	11	210.358.036	11	218.772.357	11	227.523.252	11	236.624.182	
5.1.01.101.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		1	200.000.000	1	210.358.036	1	218.772.357	1	227.523.252	1	236.624.182	
5.1.01.101.08 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Tersusunnya data dan informasi statistik sektoral PD		1	40.000.000	1	42.071.607	1	43.754.471	1	45.504.650	1	47.324.836	
5.1.01.101.10 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Perangkat Daerah		1	40.000.000	1	42.071.607	1	43.754.471	1	45.504.650	1	47.324.836	
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemerikaan (TLHP)			100		100		100		100		100		
	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah				97		97		97		97		97		
5.1.01.102.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		253	24.324.756.252	253	25.584.539.731	253	26.607.921.320	253	27.672.238.173	253	28.779.127.700	
5.1.01.102.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	300.000.000	1	315.537.054	1	328.158.536	1	341.284.877	1	354.936.272	

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
5.1.01.102.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	150.000.000	1	157.768.527	1	164.079.268	1	170.642.439	1	177.468.136	KASUBAG KEUANGAN DAN ASET
5.1.01.102.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD		1	100.000.000	1	105.179.018	1	109.386.179	1	113.761.626	1	118.312.091	
5.1.01.102.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1	20.000.000	1	21.035.804	1	21.877.236	1	22.752.325	1	23.662.418	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Tersusunnya Dokumen bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.		1	20.000.000	1	21.035.804	1	21.877.236	1	22.752.325	1	23.662.418	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100	100.000.000	100	105.179.018	100	109.386.179	100	113.761.626	100	118.312.091	KASUBAG KEUANGAN DAN ASET
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	40.000.000	1	42.071.607	1	43.754.471	1	45.504.650	1	47.324.836	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	40.000.000	1	42.071.607	1	43.754.471	1	45.504.650	1	47.324.836	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	20.000.000	1	21.035.804	1	21.877.236	1	22.752.325	1	23.662.418	
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah			78		80		82		84		86		
	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah				65		70		75		80		85		
	Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK				70		75		80		85		90		
5.1.01.105.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		130	70.000.000	135	73.625.313	140	76.570.325	145	79.633.138	150	82.818.464	
5.1.01.105.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		253	50.000.000	253	52.589.509	253	54.693.089	253	56.880.813	253	59.156.045	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kompilasi data administrasi kepegawaian		Tersusunnya dokumen kompilasi data administrasi kepegawaian		1	50.000.000	1	52.589.509	1	54.693.089	1	56.880.813	1	59.156.045	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terbinanya Pegawai yang mengimplementasikan peraturan perundang-undangan		253	70.000.000	253	73.625.313	253	76.570.325	253	79.633.138	253	82.818.464	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Tersusunnya dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	100.000.000	1	105.179.018	1	109.386.179	1	113.761.626	1	118.312.091	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)			100		100		100		100		100		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI				65		70		75		80		85		
	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah			2,6		3		3,5		3,8		4,2		
	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal			65		70		75		80		85		
5.1.01.106.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5	150.000.000	5	157.768.527	5	164.079.268	5	170.642.439	5	177.468.136	
5.1.01.106.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		1	50.000.000	1	52.589.509	1	54.693.089	1	56.880.813	1	59.156.045	
5.1.01.106.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		**1**	180.000.000	**1**	189.322.232	**1**	196.895.121	1	204.770.926	1	212.961.763	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Tersusunnya dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD		1	40.000.000	1	42.000.000	1	44.000.000	1	45.000.000	1	48.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Terkelolanya arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital Perangkat Daerah		1	40.000.000	1	42.071.607	1	43.754.471	1	45.504.650	1	47.324.836	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah			70		75		80		85		90		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	140.000.000	1	147.322.232	1	152.895.121	1	159.770.926	1	164.961.763	
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			3		3,5		3,7		4		4,5		
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi				84		85		86		87		88		
5.1.01.108.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan JasaSurat Menyurat		1	30.000.000	1	31.553.705	1	32.815.854	1	34.128.488	1	35.493.627	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5.1.01.108.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	700.000.000	1	736.253.125	1	765.703.250	1	796.331.380	1	828.184.635	
5.1.01.108.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	200.000.000	1	210.358.036	1	218.772.357	1	227.523.252	1	236.624.182	
5.1.01.108.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	200.000.000	1	210.358.036	1	218.772.357	1	227.523.252	1	236.624.182	
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah			100		100		100		100		100		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
5.1.01.109.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		48	60.000.000	48	63.107.411	48	65.631.707	48	68.256.975	48	70.987.254	
5.1.01.109.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6	200.000.000	6	210.358.036	6	218.772.357	6	227.523.252	6	236.624.182	
5.1.01.109.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		1	100.000.000	1	105.179.018	1	109.386.179	1	113.761.626	1	118.312.091	
5.1.01.109.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	100.000.000	1	105.179.018	1	109.386.179	1	113.761.626	1	118.312.091	
UPTD PMHP						**850.000.000**		**1.062.947.545**		**1.324.286.070**		**1.584.404.064**		**1.945.780.227**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**83**	**250.000.000**	**83.2**	**262.947.545**	**83.4**	**273.465.447**	**83.6**	**284.404.064**	**84**	**295.780.227**	
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan			**97**		**97**		**97**		97		97		
3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumrn)		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	15.930.000	1	21.240.000	1	26.550.000	1	31.860.000	1	42.480.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3	5.200.000	3	5.200.000	3	6.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	
• 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	67.800.000	1	67.800.000	1	67.800.000	1	67.800.000	1	67.800.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah			100		100		100		100		100		
• 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	1.070.000	1	8.707.545	1	13.115.447	1	17.744.064	1	18.500.227	
• 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor												
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase pelaku usaha KP yang menerapkan Standar Mutu Perikanan (%)**	**Meningkatnya penerapan standar mutu perikanan**			**50**	**600.000.000**	**55**	**800.000.000**	**62**	**1.050.820.623**	**68**	**1.300.000.000**	**75**	**1.650.000.000**	
3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Inovasi yang diterapkan (inovasi)	Meningkatnya penerapan Inovasi		1	1		1		1		1		1		

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, danDaya Saing serta PemberdayaanUsaha dalam rangkaMenghasilkanProdukyang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka menghasilkan Produk yang aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya saing (kegiatan)		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1	1	300.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	1	825.000.000	
3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (kegiatan)		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1	1	300.000.000	1	400.000.000	1	550.820.623	1	700.000.000	1	825.000.000	
UPT PERBENIHAN						**3.350.000.000**		**3.594.021.652**		**4.079.782.518**		**4.266.973.819**		**4.905.652.772**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**85**	**850.000.000**	**86**	**894.021.652**	**87**	**929.782.518**	**88**	**966.973.819**	**89**	**1.005.652.772**	
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan			97		97		97		97		97		
3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumrn)		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	70.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3	10.000.000	3	10.000.000	3	20.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	481.000.000	1	525.021.652	1	531.000.000	1	550.000.000	1	586.652.772	
• 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah			100		100		100		100		100		
• 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10	60.000.000	10	60.000.000	12	69.782.518	12	77.973.819	14	80.000.000	
• 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2	226.000.000	2	226.000.000	2	226.000.000	2	226.000.000	2	226.000.000	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**PAD (Rp. 1000)**	**Meningkatnya PAD**		**1463265**	**2.000.000**	**2.500.000.000**	**2.025.000**	**2.700.000.000**	**2.050.000**	**3.150.000.000**	**2.100.000**	**3.300.000.000**	**2.150.000**	**3.900.000.000**	

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih (juta ekor)	Meningkatnya produksi benih perikanan air payau dan tawar			1,5	-	1,6	-	1,7	-	1,8	-	1,9	-	
	Produksi Budidaya (Kg)				26.000		29.000,0		32.000,0		34.000		36.000		
3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana PembudidayaanIkan di Air Payau danAir Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		TersedianyaSaranaPembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		9	2.500.000.000	9	2.700.000.000	9	3.150.000.000	9	3.300.000.000	9	3.900.000.000	
UPT WILAYAH I						**1.900.000.000**		**2.144.811.161**		**2.265.342.274**		**2.351.376.854**		**2.457.042.150**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**83**	**900.000.000**	**84**	**946.611.161**	**85**	**984.475.607**	**86**	**1.023.854.632**	**87**	**1.064.808.817**	
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan			97		97		97		97		97		
3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumrn)		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	68.640.000	1	68.640.000	1	68.640.000	1	68.640.000	1	68.640.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	28.154.228	1	28.154.228	1	28.154.228	1	28.154.228	1	69.108.413	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	561.995.272	1	603.606.433	1	628.606.433	1	623.606.433	1	613.606.433	
• 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	200.400.000	1	200.400.000	1	200.400.000	1	200.400.000	1	200.400.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah			100		100		100		100		100		
• 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12	15.810.500	13	15.810.500	14	23.674.946	15	63.053.971	16	63.053.971	
• 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	
3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**PAD (Rp1.000)**	**Meningkatnya PAD**		**1.140.474**	**1.096.854**	**650.000.000**	**1.098.354**	**812.500.000**	**1.099.854**	**866.666.667**	**1.101.354**	**884.722.222**	**1.102.854**	**920.833.333**	
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	Meningkatnya produksi ikan		1.549.630,00	1.649.630,00		1.749.630,00		1.849.630,00		1.949.630,00		2.049.630,00		
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan)		Terpenuhinya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	9	9	650.000.000	9	812.500.000	9	866.666.667	9	884.722.222	9	920.833.333	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I**	**Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil**			**47**	**350.000.000**	**49**	**385.700.000**	**52**	**414.200.000**	**55**	**442.800.000**	**60**	**471.400.000**	
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	meningkatnya kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan		50	55		60		65		68		70		

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL I)		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	471,17	518,29	350.000.000	565,40	385.700.000	612,52	414.200.000	640,79	442.800.000	659,64	471.400.000	

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
UPT WILAYAH II						**1.500.000.000**		**1.704.274.107**		**1.803.850.405**		**1.874.080.866**		**1.960.439.211**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			**85.75**	**85.80**	**600.000.000**	**86.00**	**631.074.107**	**86.25**	**656.317.072**	**86.50**	**682.569.755**	**86.75**	**709.872.545**	
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan			97		97		97		97		97		
3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	42.569.755	1	48.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	42.000.000	1	48.872.545	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
• 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah			100		100		100		100		100		
• 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10	20.000.000	10	28.074.107	10	35.000.000	10	40.000.000	10	48.000.000	
• 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		2	15.000.000	2	28.000.000	2	36.317.072	2	43.000.000	2	50.000.000	
3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**PAD (Rp1.000)**	**Meningkatnya PAD**		**401.554**	**1.033.500**	**550.000.000**	**1.085.175**	**687.500.000**	**1.140.000**	**733.333.333**	**1.196.000**	**748.611.111**	**1.260.000**	**779.166.667**	
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	Meningkatnya produksi ikan		1.832.340,00	2.025.965,00		2.127.263,00		2.233.626,00		2.345.307,00		2.462.573,00		
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan)		Terpenuhinya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	6	6	550.000.000	6	687.500.000	6	733.333.333	6	748.611.111	6		
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II**	**Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil**			**58,00**	**350.000.000**	**60**	**385.700.000**	**62**	**414.200.000**	**65**	**442.900.000**	**67**	**471.400.000**	
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	meningkatnya kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan		50	55		60		65		70		80		
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL II)		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	60.638,23	66.702,05	350.000.000,00	72.765,88	385.700.000,00	78.829,70	414.200.000,00	84.893,52	442.900.000,00	97.021,17	471.400.000	

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
UPT WILAYAH III						**1.450.000.000**		**1.651.684.598**		**1.749.157.316**		**1.817.200.053**		**1.901.283.166**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**83**	**550.000.000**	**83.2**	**578.484.598**	**83.3**	**601.623.982**	**83.4**	**625.688.942**	**83.6**	**650.716.499**	
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan			97		97		97		97		97		
3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	68.640.000	1	68.640.000	1	68.640.000	1	68.640.000	1	68.640.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.623.982	1	15.688.942	1	16.405.441	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	235.000.000	1	258.484.598	1	275.990.000	1	294.965.000	1	309.208.058	
• 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	193.200.000	1	193.200.000	1	193.200.000	1	193.200.000	1	193.200.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah			100		100		100		100		100		
• 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10	13.160.000	10	13.160.000	10	13.170.000	10	13.195.000	10	13.263.000	
• 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	
3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**PAD (Rp1.000)**	**Meningkatnya PAD**		**494.567**	**495.000**	**550.000.000**	**500.000**	**687.500.000**	**520.000**	**733.333.333**	**550.000**	**748.611.111**	**560.000**	**779.166.667**	
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	Meningkatnya produksi ikan		542.631,00	598.250,00		628.162,00		629.570,00		661.048,00		694.100,00		
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan)		Terpenuhinya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	9	9	550.000.000	9	687.500.000	9	733.333.333	0	748.611.111	9	779.166.667	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah III**	**Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil**			**56,50**	**350.000.000**	**58,5**	**385.700.000**	**61**	**414.200.000**	**63**	**442.900.000**	**65**	**471.400.000**	
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	meningkatnya kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan		50	55		60		65		70		75		
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL III)		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	6341,016	64442,026	350.000.000	70300,392	385.700.000	76158,758	414.200.000	82017,124	442.900.000	87875,49	471.400.000	

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
UPT WILAYAH IV						**1.050.000.000**		**1.211.147.545**		**1.287.665.447**		**1.339.704.064**		**1.404.680.227**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**83**	**250.000.000**	**83**	**262.947.545**	**84**	**273.465.447**	**85**	**284.404.064**	**86**	**295.780.227**	
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan			97		97		97		97		97		
3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumrn)		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	16.376.163	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.517.902	1	10.517.902	1	20.517.902	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	
• 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah			100		100		100		100		100		
• 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	15.000.000	1	27.947.545	1	27.947.545	1	27.947.545	1	27.947.545	
• 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.938.617	1	20.938.617	
3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**PAD (Rp1.000)**	**Meningkatnya PAD**		**202.262**	**260.000**	**450.000.000**	**280.000**	**562.500.000**	**300.000**	**600.000.000**	**320.000**	**612.500.000**	**340.000**	**637.500.000**	
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	Meningkatnya produksi ikan		1.532.462,00	1.542.462,00		1.547.462,00		1.552.462,00		1.557.462,00		1.562.462,00		
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan)		Terpenuhinya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	3	450.000.000	3	562.500.000	3	600.000.000	3	612.500.000	3	637.500.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah IV**	**Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil**			**58,00**	**350.000.000**	**60**	**385.700.000**	**62**	**414.200.000**	**65**	**442.800.000**	**67**	**471.400.000**	
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	meningkatnya kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan		50	55		60		65		70		75		
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL IV)		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	20.391,54	22.430,69	350.000.000	24.469,85	385.700.000	26.509,00	414.200.000	28.548,16	442.800.000	30.587,31	471.400.000	
UPT WILAYAH V						**1.650.000.000**		**1.862.042.634**		**1.967.929.673**		**2.044.723.304**		**2.137.907.348**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**83**	**750.000.000**	**84**	**788.842.634**	**84**	**820.396.340**	**85**	**853.212.193**	**85**	**887.340.681**	

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan			97		97		97		97		97		
3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumrn)		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	64.560.000	1	64.560.000	1	64.560.000	1	64.560.000	1	64.560.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			97		97		97		97		97		
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	3.500.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			97		97		97		97		97		
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	600.000.000	1	625.000.000	1	635.000.000	1	650.000.000	1	675.000.000	
• 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	69.940.000	1	81.282.634	1	101.336.340	1	117.652.193	1	125.280.681	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah			97		97		97		97		97		
• 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.500.000	1	8.000.000	1	8.500.000	
• 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000	
3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**PAD (Rp1.000)**	**Meningkatnya PAD**		**1.000.777**	**800.000**	**550.000.000**	**805.000**	**687.500.000**	**810.000**	**733.333.333**	**815.000**	**748.611.111**	**820.000**	**779.166.667**	
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	Meningkatnya produksi ikan		941.845,00	941.845,00		950.000,00		960.000,00		970.000,00		980.000,00		
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan)		Terpenuhinya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	9	9	550.000.000	9	687.500.000	9	733.333.333	9	748.611.111	9	779.166.667	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V**	**Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil**			**47,00**	**350.000.000**	**49**	**385.700.000**	**52**	**414.200.000**	**55**	**442.900.000**	**60**	**471.400.000**	
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	meningkatnya kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan		50	55		60		65		70		75		
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL V)		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	29.550,19	32.505,21	350.000.000	35.460,23	385.700.000	38.415,25	414.200.000	41.370,27	442.900.000	44.325,29	471.400.000	
UPT WILAYAH VI						**1.550.000.000**		**1.766.874.107**		**1.871.117.072**		**1.942.136.421**		**2.031.472.545**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**83**	**600.000.000**	**83**	**631.074.107**	**83**	**656.317.072**	**83**	**682.569.755**	**83**	**709.872.545**	
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan			97		97		97		97		97		

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumrn)		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	73.200.000	1	78.274.107	1	80.000.000	1	85.000.000	1	89.872.545	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	300.000.000	1	310.000.000	1	316.000.000	1	320.000.000	1	340.000.000	
• 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	76.800.000	1	76.800.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah			100		100		100		100		100		
• 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	25.000.000	1	33.000.000	1	40.317.072	1	45.000.000	1	45.000.000	
• 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		1	25.000.000	1	33.000.000	1	40.000.000	1	42.569.755	1	45.000.000	
3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**PAD (Rp1.000)**	**Meningkatnya PAD**		**207.980**	**520.000**	**600.000.000**	**525.000**	**750.000.000**	**530.000**	**800.000.000**	**535.000**	**816.666.667**	**550.000**	**850.000.000**	
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	Meningkatnya produksi ikan		150.000,00	165.000,00		181.500,00		199.650,00		219.615,00		245.000,00		
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan)		Terpenuhinya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	2	4	600.000.000	4	750.000.000	4	800.000.000	4	816.666.667	4	850.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VI**	**Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil**			**55,0**	**350.000.000**	**63**	**385.800.000**	**65**	**414.800.000**	**80**	**442.900.000**	**85**	**471.600.000**	
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	meningkatnya kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan		50	55		60		65		75		85		
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL VI)		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	373.447,60	410.792,37	350.000.000	448.137,13	385.800.000	485.481,89	414.800.000	560.171,41	442.900.000	634.860,93	471.600.000	
UPT WILAYAH VII						**650.000.000**		**750.789.509**		**805.226.422**		**842.958.591**		**887.722.712**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**83**	**50.000.000**	**84**	**52.589.509**	**86**	**57.693.089**	**88**	**59.880.813**	**90**	**62.156.045**	
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD UPT	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan			97		97		97		97		97		

OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT	Baseline 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
(7)	(6)	(4)	(5)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(8)
3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumrn)		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3	7.000.000	3	7.000.000	4	7.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100		100		100		100		100		
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2	7.000.000	2	7.000.000	3	14.693.089	4	16.880.813	4	19.156.045	
• 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	3	6.000.000	4	6.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah			100		100		100		100		100		
• 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5	10.000.000	6	12.589.509	7	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	
• 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		1	10.000.000		10.000.000	1	10.000.000	2	10.000.000	3	10.000.000	
3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%)**	**Terlaksananya pelayanan di Pelabuhan Perikanan**			**100**	**250.000.000**	**100**	**312.500.000**	**100**	**333.333.333**	**100**	**340.277.778**	**100**	**354.166.667**	
3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi ikan yang didaratkan (kg)	Meningkatnya produksi ikan			1.368.865,00		1.468.865,00		1.568.865,00		1.668.865,00		1.768.865,00		
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan)		Terpenuhinya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1	1	250.000.000	1	312.500.000	1	333.333.333	1	340.277.778	1	354.166.667	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VII**	**Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil**			**63,50**	**350.000.000**	**64,51**	**385.700.000**	**65,34**	**414.200.000**	**65,8**	**442.800.000**	**67**	**471.400.000**	
3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%)	meningkatnya kulaitas pengelolaan kawasan konservasi secara keberlanjutan		50	55		60		65		70		75		
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL VII)		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	126.062,54	138.669,87	350.000.000,00	151.276,22	385.700.000,00	163.882,58	414.200.000,00	176.488,93	442.800.000,00	189.095,28	471.400.000	
						55.468.661.852		**64.789.929.233**		**69.317.516.054**		**74.131.955.508**		**79.606.674.350**	

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(3)	(7)	(4)	(7)	(8)
	Program Berani Makmur (Program Pengelolaan Perikanan Tangkap)	**Meningkatnya produksi perikanan tangkap** **Meningkatnya PAD** **Terlaksananya pelayanan di Pelabuhan Perikanan**		**Bidang Perikanan Tangkap** **UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-6** **UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 7**
			3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Bidang Perikanan Tangkap
			3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Bidang Perikanan Tangkap
			3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap
			3.25.03.1.01.0007 Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Bidang Perikanan Tangkap
			3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap
			3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Perikanan Tangkap
			3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Bidang Perikanan Tangkap
			3.25.03.1.02.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap
			3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Bidang Perikanan Tangkap
			3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5GT-30GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Bidang Perikanan Tangkap
			3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Bidang Perikanan Tangkap UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-7
			3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap
			3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-7
	Program Berani Makmur (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya** **Meningkatnya PAD**		**Bidang Perikanan Budidaya** **UPTD Perbenihan**
			3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Perikanan Budidaya
			3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Bidang Perikanan Budidaya
			3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Bidang Perikanan Budidaya

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(3)	(7)	(4)	(7)	(8)
			3.25.04.1.04 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Perikanan Budidaya
			3.25.04.1.04.0002 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Perikanan Budidaya
			3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Bidang Perikanan Budidaya
			3.25.04.1.05.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Perikanan Budidaya
			3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Bidang Perikanan Budidaya
			3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Bidang Perikanan Budidaya
			3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Perikanan Budidaya
			3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perikanan Budidaya
			3.25.04.1.05.0014 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Bidang Perikanan Budidaya
			3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Bidang Perikanan Budidaya
				UPTD Perbenihan
			3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bidang/UPTD Perbenihan
			3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikandi Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perikanan Budidaya
	Program Berani Makmur (Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan)	**Meningkatnya serapan produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan**		**Bidang P2HP**
		Meningkatnya penerapan standar mutu perikanan		**UPTD PMHP**
			3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang P2HP
			3.25.06.1.01.0004 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang P2HP
			3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Bidang P2HP
				UPT PMHP
			3.25.06.1.02.0003 PelaksanaanPembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, danDaya Saing serta PemberdayaanUsaha dalam rangkaMenghasilkanProdukyang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Bidang P2HP/UPT PMHP

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(3)	(7)	(4)	(7)	(8)
			3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	UPT PMHP
			3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang P2HP
			3.25.06.1.03.0001 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang P2HP
			3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang P2HP
	Program Berani Makmur (Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)	**Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil**		**Bidang PRL** **UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-7**
			3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Bidang PRL UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-7
			3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Bidang/UPTD Pelabuhan Perikanan & KKP3K Wilayah 1-7
			3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang PRL
			3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang PRL
			3.25.02.1.01.0005 Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Bidang PRL
			3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Bidang PRL
			3.25.02.1.02.0006 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Bidang PRL
			3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikana	Bidang PRL
			3.25.02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Bidang PRL
			3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang PRL
			3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang PRL
			3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang PRL
			3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Bidang PRL
			3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Bidang PRL
			3.25.02.1.03.0007 Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Bidang PRL

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(3)	(7)	(4)	(7)	(8)
	Program Berani Makmur (Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan)	**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang diperiksa** **Meningkatnya kasus pelanggaran kelautan perikanan yang tertangani** **Meningkatnya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan**		**Bidang PSDKP**
			3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Bidang PSDKP
			3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Bidang PSDKP
			3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12Mil sesuai kewenangan provinsi	Bidang PSDKP
			3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Bidang PSDKP
			3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan kewenangan provinsi	Bidang PSDKP
			3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Bidang PSDKP
			3.25.05.1.01.0018 Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Bidang PSDKP
			3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang PSDKP
			3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Bidang PSDKP

Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai Tukar Nelayan	Persen (%)	101,05	101,86	102,67	103,49	104,32	105,16	
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Persen (%)	101,03	101,54	102,04	102,55	103,07	103,58	
Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	40,65	43,4	44,5	45,6	46,7	47,6	
Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	Rasio	0,1803	0,1804	0,1806	0,1808	0,181	0,1812	
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Peraturan Per UU	%	82	83	84	85	86	87	

Tabel 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Produksi Perikanan	ton	818.921,12	1.191.132,15	1.178.457,21	1.191.670,53	1.205.037,40	1.218.559,70	
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Peraturan Per UU	%	82	83	84	85	86	87	